



# LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT**

**TAHUN  
2018**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
TAHUN 2018**



# LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT**

**TAHUN  
2018**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
TAHUN 2018**



## *Kata Pengantar*

**P**uji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Setditjen PAUD dan Dikmas) selama tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada instansi pemerintah untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas menyusun laporan kinerja sebagai upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Setditjen PAUD dan Dikmas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan dukungan teknis manajemen di bidang PAUD dan Dikmas secara transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas 2018 merupakan pertanggungjawaban yang berisi informasi atas capaian sasaran strategis dalam lingkup Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas dalam satu tahun anggaran. Secara garis besar, Laporan Kinerja ini menuangkan hasil pelaksanaan program di tahun keempat perealisasi target Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas 2015-2019. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan koreksi untuk mengetahui prestasi yang diraih dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program PAUD dan Dikmas sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala/permasalahan yang ada.

Data dan informasi yang tertuang di dalam Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perhatian seluruh pimpinan dan juga para pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas. Hal ini ditujukan untuk melanjutkan, merealisasikan tujuan, dan memperbaiki kinerja dalam perealisasi target Rencana Strategis pada tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2019

Sekretaris,

Dr. Wartanto, MM.

NIP. 196310091989031001

## *Daftar Isi*

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	4
E. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	8
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
A. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I .....	10
B. Layanan Internal (Overhead).....	16
C. Layanan Perkantoran .....	16
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>18</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran .....	72
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK Awal dan PK Akhir)	
2. Dokumen Pengukuran Kinerja	



## *Kehtisan Eksekutif*

**L**aporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT 2018 yang merupakan Pelaksanaan dari Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Fungsi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PAUD dan Dikmas yang diemban oleh Sekretariat Dirjen PAUD dan Dikmas adalah untuk memenuhi tujuan strategis ketersediaan sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan. Pengukuran pencapaian tujuan strategis tersebut ditetapkan di dalam sasaran strategis dan tertuang dalam 3 indikator kinerja.

Pada tahun 2018, terdapat 3 indikator capaian yang menunjang sasaran strategis, yaitu: (1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; (2) Layanan Internal (Overhead); (3) Layanan Perkantoran. Target indikator kinerja tersebut terealisasi sebanyak 1 layanan dengan persentase capaian 100%. Selain itu capaian pelaksanaan anggaran Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 89,20% (Berdasarkan hasil dari aplikasi Monitoring Laporan Keuangan/ MoLK).

Meskipun sudah terealisasi namun masih ditemukan beberapa kendala/hambatan tidak terealisasinya anggaran sesuai target antara lain sebagai berikut: (1) Perpres No 130 th 2018 terkait kenaikan Tunjangan Kinerja menjadi 80% baru terbit pada tanggal 28 Desember 2018. Sehingga anggaran Tunjangan Kinerja yang sudah disiapkan tidak ada waktu lagi untuk proses pencairan. sehingga daya serap anggarannya masih belum optimal; (2) Pada akhir tahun 2018 ada alokasi anggaran untuk tanggap bencana yang direvisi dan masuk ke sekretariat PAUD dan Dikmas sementara waktunya sudah mendesak di akhir tahun sehingga daya serapnya menjadi kurang maksimal.

Upaya antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut adalah: (1) Melakukan perhitungan tunjangan kinerja dengan langsung melibatkan satuan kerja yang ada di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas; (2) Melakukan langkah-langkah untuk mempercepat proses penyaluran dana bantuan dengan bekerja sama dengan UPT PAUD dan Dikmas.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Undang-undang dasar 1945 alinea keempat mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut merupakan janji yang harus dipenuhi pemerintah, untuk itu salah satu tujuan pendidikan dan kebudayaan dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah usaha untuk memenuhi ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perencanaan program dan kegiatan disusun sebagai aksi nyata yang direalisasikan oleh unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap unit utama menyusun perencanaan program dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit utama sebagai suatu integrasi yang tidak saling terpisahkan dalam payung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hasil survei KemenPAN-RB untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mendapat nilai terbaik dari sudut Integritas Organisasi dari seluruh unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari segi Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi Ditjen PAUD dan Dikmas Mendapat nilai 3,75 dari skor tertinggi 4,00. Dari segi Integritas Kerja terkait pengelolaan SDM Ditjen PAUD dan Dikmas mendapat nilai 3,79 dari skor tertinggi 4,00.

Penguatan tata kelola yang baik dalam birokrasi pemerintahan (*good governance*) merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan. Lemahnya *good governance* menyebabkan layanan pendidikan belum dapat dilaksanakan secara merata, bermutu, berkeadilan, dan akuntabel. Fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, dan ketenagaan, serta dukungan infrastruktur secara umum turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.



Sebaliknya, kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Kelemahan dan tantangan ini terasa semakin berat apabila dikaitkan dengan pelaksanaan program-program di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang memiliki sasaran masyarakat marginal yang memiliki kelemahan dan kendala baik ekonomis, geografis, infrastruktur pendidikan, sehingga kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan. Apalagi jika dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian besar sasaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat tinggal di daerah pedesaan yang terpencil dan terisolir.

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan manajerial dan administratif, pembinaan serta melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Dalam konteks pelaksanaan program-program di bidang PAUD dan Dikmas, maka tugas Sekretariat Direktorat Jenderal dapat dikatakan sangat strategis karena keberhasilan pelaksanaan program itu sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi pelayanan teknis dan administrasi maupun pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dikmas.

Oleh karena itu, kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan agar mampu mendorong peran serta seluruh pihak dan memperlancar pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan objektif sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya lebih berhasil dan berdaya guna untuk mendukung tercapainya visi dan misi PAUD dan Dikmas.

Pemerintah telah berusaha untuk mendorong agar setiap instansi pemerintah dapat melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan *good governance*. Secara formal, upaya ini mulai dilaksanakan pada tahun 1999 seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipandang sebagai salah satu determinan yang menentukan keberhasilan

mewujudkan *good governance*.

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas berusaha untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018 sebagai langkah preventif dalam melakukan pelaksanaan program tahun 2019. Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2018 berdasar pada:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
- g. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015-2019.

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas disusun dengan maksud untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan tentang pencapaian target, daya serap anggaran,



kendala dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program dan anggaran. Adanya evaluasi ini ditujukan agar dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan agar pelaksanaan program-kegiatan pada tahun selanjutnya dapat berjalan dengan baik, sehingga pada akhir tahun anggaran mendatang seluruh program dan target dapat tercapai dengan baik.

## 2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018 ini bertujuan untuk:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Setditjen PAUD dan Dikmas;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan program dan anggaran untuk tahun 2019;
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PAUD dan Dikmas;
- d. Memberikan informasi akurat kepada seluruh *stakeholder* mengenai akuntabilitas kinerja Setditjen PAUD dan Dikmas;
- e. Meningkatkan pengendalian efektivitas pelaksanaan program-kegiatan yang merata, bermutu dan akuntabel sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan analisis pelaksanaan program serta kegiatan Setditjen PAUD dan Dikmas sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan;
- g. Mempercepat terwujudnya *good governance* sebagai prasyarat pelaksanaan kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan dan pelayanan prima.

## D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Setditjen PAUD dan Dikmas) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta berkoordinasi dengan satuan kerja organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 tersebut Setditjen PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. Koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas;
- f. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas;
- h. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas;
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- j. Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas; dan
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas.

Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas terbagi menjadi 4 Bagian, dimana masing-masing Bagian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **1. Bagian Perencanaan dan Penganggaran**

Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas ini, Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;



- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- e. Penyusunan laporan Direktorat Jenderal.

## **2. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara**

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas ini, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

## **3. Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian**

Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kajian dan fasilitasi bantuan hukum, organisasi, tata laksana serta urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas ini, Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

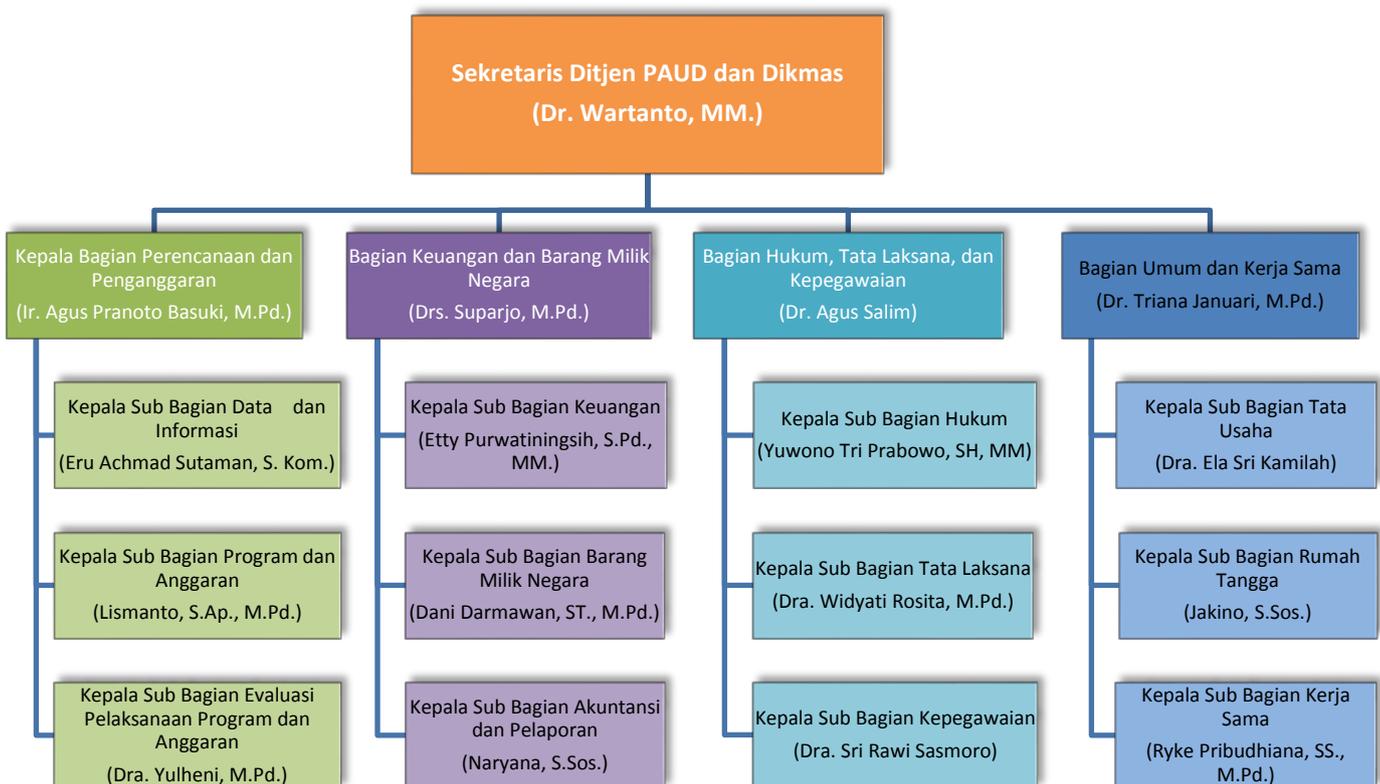
- a. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### 4. Bagian Umum dan Kerja Sama

Bagian Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtangaan serta penyusunan bahan koordinasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas ini, Bagian Umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- Pelaksanaan urusan kerumahtangaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- Penyusunan bahan koordinasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Selengkapnya, struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas tersaji dalam diagram di bawah ini.



Gambar 1

Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas



## E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Setditjen PAUD dan Dikmas memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis yaitu melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta berkordinasi dengan satuan kerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen PAUD dan Dikmas dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas dengan didampingi oleh 4 Kepala Bagian. Setditjen PAUD dan Dikmas tentunya memiliki permasalahan atau kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan PAUD dan Dikmas menjadi urusan Kabupaten/Kota sehingga pemerintah Provinsi tidak memiliki tugas bidang PAUD dan Dikmas. Perubahan ini berpengaruh pada kelancaran kegiatan dan kerja sama di tingkat provinsi.
2. Perlunya mempertahankan wilayah bebas dari korupsi dan terus meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang.

Terkait dengan permasalahan utama/isu strategis di atas, maka Setditjen PAUD dan Dikmas melakukan berbagai antisipasi dan pemecahan masalah. Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut tentunya satuan kerja yang berada di bawah koordinasi Setditjen PAUD dan Dikmas dilibatkan dalam memberikan masukan serta melakukan pemecahan masalah. Dengan pelibatan satker serta pemecahan masalah yang komprehensif, diharapkan dapat mencapai target kinerja tahun 2018 sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas pada awal tahun anggaran menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas yang menetapkan satu sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja beserta target kinerja dan target anggaran yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Target dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas mengalami perubahan (revisi) seiring dengan perubahan DIPA dan RKAKL yang telah disahkan. Adapun rincian revisi RKT 2018 dan perjanjian Kontrak Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas adalah menetapkan satu sasaran kegiatan strategis yang digunakan sebagai arah dalam pelaksanaan kegiatan, yakni meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas dengan didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja layanan, yaitu (1) layanan dukungan manajemen eselon I, (2) layanan internal (*overhead*), dan (3) layanan perkantoran.

Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tetap menekankan pada kualitas pelayanan program dengan orientasi peningkatan kemampuan masyarakat yang berfokus pada dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Pada awal tahun 2018, Sekretaris PAUD dan Dikmas melaksanakan perjanjian kinerja dengan Dirjen PAUD dan Dikmas dengan menetapkan satu sasaran strategis dan sebelas indikator kinerja, dengan anggaran sebesar Rp271.406.155.000,00, danyang diperjanjikan kinerja sebesar Rp109.649.672.000. Setelah dilakukan revisi, terjadi perubahan jumlah indikator kinerja, menjadi tiga indikator kinerja dengan anggaran Rp277.566.749.000,00. Berbeda dengan tahun sebelumnya, terdapat perbedaan antara alokasi anggaran dan yang diperjanjikan, untuk tahun ini antara jumlah anggaran yang dialokasikan dengan jumlah anggaran yang diperjanjikan adalah sama, hal ini disebabkan karena Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan.



Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas, perealisasiannya didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

#### **A. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**

Kinerjanya ditargetkan sebanyak 1 layanan, dengan anggaran sebesar Rp109.649.672.000,00. Setelah revisi, target kinerja tetap sebanyak 1 layanan dengan anggaran menjadi Rp116.327.484.000. Kenaikan alokasi anggaran tersebut disebabkan oleh adanya perubahan alokasi anggaran untuk kegiatan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan data dan informasi, pelayanan hukum dan kepatuhan internal, pelayanan rumah tangga, layanan humas dan protokoler.

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan layanan dukungan manajemen eselon I, merupakan kegiatan yang hanya dimiliki oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan yang bersifat permanen.

##### **1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran:**

- a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program PAUD dan Dikmas
- b. Penyusunan Program Kerja Ditjen PAUD dan Dikmas
- c. FGD Pendidikan Bidang PAUD dan Dikmas
- d. Penyiapan dan Penelaahan RKAKL tingkat Eselon I dan Penyiapan Rencana Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2009
- e. Koordinasi Perencanaan Pusat (Kemendikbud-Kemenkeu-DPR-Bappenas)
- f. Asistensi Penelitian dan Penelaahan RKAKL dengan Kemenkeu Tahun Anggaran 2019
- g. Asistensi Pelaksanaan Program dan Pengendalian Revisi Anggaran di UPT Tahun Anggaran 2018
- h. Pokja Sinkronisasi Unit Pelaksana Teknis
- i. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran
- j. Peningkatan Kapasitas Petugas Perencanaan UPT
- k. Penyusunan Buku Perencanaan
- l. Reviu Renstra dan Renja Ditjen PAUD dan Dikmas
- m. Penyusunan KRISNA dan Reviu Output RKAKL
- n. Koordinasi dan Pengendalian Rapim B
- o. Penyusunan Naskah Kebijakan dan Bahan Paparan
- p. Penyusunan RKP 2019

## **2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi:**

- a. Asistensi Penyusunan Laporan dan Perkembangan
- b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran PAUD dan Dikmas
- c. Tim Evaluasi dan Pelaporan
- d. Penyusunan Instrumen Monev
- e. Rakor evaluasi pelaksanaan program Ditjen PAUD Dikmas Tahun 2018
- f. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas 2017
- g. Penyusunan Laporan Kinerja Tengah tahunan Ditjen PAUD dan Dikmas 2018
- h. Asistensi Penilaian dan Evaluasi SAKIP Ditjen PAUD dan Dikmas
- i. Penggandaan Buku Laporan Kinerja
- j. Penyusunan dan Finalisasi Laporan Evaluasi dan Pelaksanaan Program
- k. Peningkatan Kapasitas Penyusunan Laporan Kinerja
- l. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas
- m. Finalisasi Instrumen Monev
- n. FGD Pengolahan dan Analisis Data Monev
- o. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi

## **3. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan:**

- a. Koordinasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
- b. Temu Koordinasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
- c. Penyusunan Juknis Bantuan Penguatan PUG Kab/Kota
- d. Uji Petik Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

## **4. Pengelolaan Data dan Informasi:**

- a. Workshop Pemutakhiran DAPODIK PAUD dan Dikmas
- b. Workshop Pemetaan Mutu
- c. Workshop Pengelolaan Data
- d. Bimtek Pemutakhiran Data
- e. Analisis SIM PAUD dan Dikmas
- f. Disain SIM PAUD dan Dikmas
- g. Ujicoba SIM PAUD dan Dikmas
- h. QC dan Penyempurnaan Aplikasi SIM PAUD dan Dikmas
- i. Penyusunan Pedoman dan Panduan Aplikasi SIM PAUD dan Dikmas
- j. Finalisasi aplikasi dan penyusunan laporan
- k. Pengembangan aplikasi SIM PAUD dan Dikmas



- l. Penyusunan Buku Data Pendidikan PAUD dan Dikmas
  - m. Kajian analisis data PAUD dan Dikmas
  - n. Layanan Data dan Informasi
  - o. Penyusunan Bahan Kebijakan dan NSPK
  - p. Kesekretariatan Pendataan Tingkat Pusat
  - q. SDGs 2018
  - r. Tim Teknis PAUD dan Dikmas
- 5. Penyelenggaraan Seameo Ceccep:**
- a. Publikasi Jurnal Seameo Ceccep
  - b. Pelaksanaan Governing Board Meeting
  - c. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Kapasitas
  - d. Kesekretariatan Seameo Ceccep
  - e. Pelatihan Kesejahteraan Anak
  - f. Seminar Internasional
  - g. Tim Teknis SEAMEO CECCEP
  - h. Penyusunan instrumen penelitian
  - i. Pelatihan asistensi peneliti
  - j. Workshop Pengumpulan Data
  - k. Pelaksanaan STEPP
  - l. Analisis data
- 6. Pengelolaan Keuangan:**
- a. Koordinasi/Konsultasi/Pengurusan Administrasi Keuangan
  - b. Asistensi dan Pembinaan Pengelolaan APBN (Tata Kelola, Pencairan, Pelaksanaan dan Pelaporan)
  - c. Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara
  - d. SPEM Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawas/Pemeriksa
  - e. Rekonsiliasi Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawas/Pemeriksa
  - f. Asistensi Pelaksanaan PNBPNBP
  - g. Penyusunan Tarif PNBPNBP
  - h. Pelaksanaan SPI
  - i. Penyusunan Program, Penyusunan Laporan Pemantauan tim SPI terhadap pengelolaan anggaran penyusunan Laporan Akhir Tim SPI
  - j. Penyusunan dan Evaluasi Rencana dan Program Bagian Keuangan dan BMN

- k. Tim TP TGR
- l. Sosialisasi Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun
- m. Bimbingan Teknis Aplikasi SAI dan SIMAK BMN
- n. Koordinasi dan Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL
- o. Penyusunan Laporan Bulanan SAI dan SIMAK BMN
- p. Rekonsiliasi Barang yang menghasilkan asset
- q. Penyusunan laporan triwulanan (I&III) SAI
- r. Penyusunan Laporan semesteran dan tahunan SAI dan SIMAK BMN Satker Sekretariat
- s. Penyusunan Lporan Semesteran dan tahunan dan SIMAK BMN Eselon 1
- t. Penyusunan laporan audited SAI dan SIMAK BMN

**7. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal:**

- a. Sinkronisasi program hukum, tata laksana, dan kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas
- b. Penyusunan dan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang PAUD dan Dikmas
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang PAUD dan Dikmas
- d. Fasilitasi Bantuan Hukum dan permasalahan hukum Bidang PAUD dan Dikmas
- e. Sosialisasi manajemen ASN dan Pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas
- f. Koordinasi dan Harmonisasi Bidang Hukum Ditjen PAUD dan Dikmas
- g. Monitoring dan evaluasi hukum dan perundang-undangan bidang PAUD dan Dikmas
- h. Evaluasi organisasi di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas
- i. Evaluasi penerapan SOP dan Standar Pelayanan Publik Ditjen PAUD dan Dikmas
- j. Manajemen ISO 9001:2016
- k. Penyusunan laporan implementasi RBI di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas
- l. Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas
- m. Uji Petik Jabatan Fungsional Widyapada



- n. Pembakuan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
- o. Penyusunan petunjuk teknis BP PAUD dan Dikmas
- p. Koordinasi dan harmonisasi bidang tata laksana Ditjen PAUD dan Dikmas
- q. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi Ditjen PAUD dan Dikmas

**8. Pengelolaan Kepegawaian:**

- a. Pendidikan dan pelatihan pimpinan tingkat II
- b. Pengelolaan penilaian angka kredit pamong belajar Ditjen PAUD dan Dikmas
- c. Inpassing jabatan fungsional pamong belajar
- d. Pendidikan dan pelatihan pamong belajar Ditjen PAUD dan Dikmas
- e. Peningkatan kompetensi pegawai Ditjen PAUD dan Dikmas Pendidikan dan pelatihan pengelola kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas
- f. Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas
- g. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Non Klasikal
- h. Manajemen ISO 9001:2008
- i. Penyusunan Analisis jabatan dan beban kerja di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas
- j. Koordinasi dan harmonisasi bidang tata laksana Ditjen PAUD dan Dikmas
- k. Analisis kebutuhan formasi pegawai tahun 2019
- l. Pengadaan pegawai negeri sipil di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas
- m. Pelantikan, Sumpah/janji jabatan atau PNS, serta serah terima jabatan
- n. Pembinaan dan pengelolaan kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas
- o. Badan pertimbangan pengangkatan jabatan dan kepangkatan
- p. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
- q. Koordinasi dan harmonisasi bidang kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas
- r. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas
- s. Pengembangan aplikasi kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas

**9. Pelayanan Umum dan Perlengkapan:**

- a. Koordinasi konsultasi/pengurusan administrasi BMN
- b. Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN Ditjen PAUD dan Dikmas
- c. Penyusunan rencana kebutuhan BMN Tahun 2020
- d. Operasional Unit Layanan Pengadaan

- e. Pendampingan pengadaan berbasis TIK
- f. Peningkatan kapasitas pengelola Barang Milik Negara
- g. Pemutahiran data BMN
- h. Penghapusan BMN
- i. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan BMN Ditjen PAUD dan Dikmas

**10. Pelayanan Rumah Tangga:**

- a. Evaluasi program hemat energy pada UPT PAUD dan Dikmas
- b. Penyusunan juknis hemat energy
- c. Penguatan regulasi K5
- d. Implementasi pengelolaan K5/ Regional
- e. Penataan arsip gedung arsip ciganjur
- f. Pemusnahan arsip
- g. Bimbingan teknik pengelolaan kearsipan elektronik
- h. Pendampingan pemusnahan arsip pada UPT Ditjen PAUD dan Dikmas
- i. Workshop penyusunan format surat dinas yang baik dan benar
- j. Penguatan pengelolaan *e-office* pada UPT Ditjen PAUD dan Dikmas
- k. Sosialisasi e-perpustakaan
- l. Evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama PAUD dan Dikmas
- m. Fasilitasi pengembangan/sosialisasi/perluasan model Ditjen PAUD dan Dikmas
- n. Fasilitasi kerja sama antar instansi/lembaga
- o. Fasilitasi pelaksanaan tanggap darurat
- p. Kerja sama dengan TNI dalam rangka pendidikan karakter
- q. Sekretariat Satuan Karya Widya Budaya Bakti (SWBB)
- r. Pelantikan pangkalan SWBB
- s. Sosialisasi SWBB Tahun 2018
- t. Sosialisasi NSPK Ditjen PAUD dan Dikmas
- u. Peningkatan kapasitas pengelolaan ULT bagi UPT PAUD dan Dikmas
- v. Penguatan ULT di 29 UPT PAUD dan Dikmas
- w. Rakornas SWBB Tahun 2018
- x. Pengembangan Aplikasi Perizinan Berbasis online
- y. Rakor TMMD
- z. Inspeksi Sarana prasarana unit pendukung Setditjen PAUD dan Dikmas



#### **11. Pelayanan Humas dan Protokoler:**

- a. Penyusunan Naskah Warta PAUD dan Dikmas (Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Ditjen PAUD dan Dikmas)
- b. Penyelenggaraan Konferensi Pers
- c. Penyusunan Bahan Publikasi Bidang PAUD dan Dikmas
- d. Pameran dan Promosi
- e. Pengelolaan Media Sosial PAUD dan Dikmas
- f. Lomba Pangkalan SAKA WBB
- g. Orientasi Satuan Pengamanan Di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas
- h. Orientasi Penguatan Keprotokolan di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas
- i. Orientasi Petugas Kebersihan dan Tenaga Pengemudi pada Ditjen PAUD dan Dikmas
- j. Pengembangan Aplikasi Kerumahtanggaan
- k. Penyusunan Kaleidoskop dan Profil Ditjen PAUD dan Dikmas
- l. Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan di lingkungan kerja
- m. Penyusunan Direktori SPK

#### **B. Layanan Internal (Overhead)**

Kinerjanya ditargetkan sebanyak 1 Layanan dengan anggaran sebesar Rp21.695.079.000,00. Setelah adanya revisi anggaran, kinerja tetap sebanyak 1 layanan dengan anggaran menjadi Rp21.447.861.000,00.

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan layanan internal (overhead) sebagai berikut:

1. Pengadaan kendaraan bermotor
2. Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi
3. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

#### **C. Layanan Perkantoran**

Kinerjanya ditargetkan sebanyak 1 Layanan dengan anggaran sebesar Rp140.061.404.000,00 kegiatan ini sifatnya permanen. Setelah revisi target kinerja tetap 1 layanan, dengan anggaran menjadi sebesar Rp139.761.404.000,00.

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan layanan perkantoran sebagai berikut:

**1. Gaji dan Tunjangan**

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

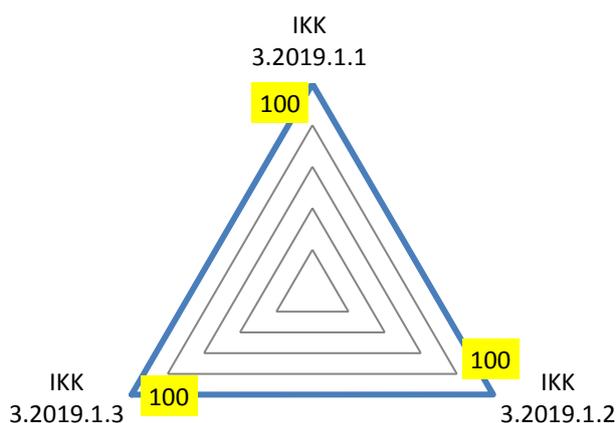
**2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor**

- a. Honorarium Tenaga Administrasi Lepas
- b. Langganan Daya dan Jasa
- c. Pemeliharaan Kantor
- d. Penyelenggaraan Poliklinik
- e. Pembayaran Terkait Dengan Operasional Satker
- f. Konsumsi, Jamuan, dan Operasional Kantor
- g. Pembayaran Operasional Pengelolaan Keuangan
- h. Persediaan Keperluan Perkantoran
- i. Penataan Gudang Ciganjur dan Sasana Krida Kemanggisan

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun di awal tahun 2018, Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas bertugas untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan sebagai bentuk pertanggungjawaban.



#### Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas

**IKK.3.2019.1.1** Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

**IKK.3.2019.1.2** Layanan Internal (Overhead)

**IKK.3.2019.1.3** Layanan Perkantoran

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas, perealisasiannya didukung oleh 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

#### 1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Ditargetkan sebanyak 1 layanan. Setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 1 layanan dengan persentase capaian 100%. Perealisasi indikator tersebut, didukung oleh kegiatan:

## 1.1 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program dan anggaran sudah terealisasi sesuai target dengan rincian sebagai berikut :

### a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Ditjen PAUD Dikmas

Dilaksanakan pada awal tahun, yaitu pada Bulan Februari. Kegiatan ini mengundang pejabat dari seluruh kab/kota di Indonesia. Tujuan kegiatan ini guna melakukan sosialisasi kebijakan dan program Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 tahap, yaitu di Lombok, Anyer, dan Belitung. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.



Gambar 2

*Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Ditjen PAUD Dikmas*

### b. Penyusunan Program Kerja Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018

Kegiatan ini dilaksanakan pada awal tahun dengan tujuan menyiapkan, mengkompilasi, dan menyusun program kerja Ditjen PAUD dan Dikmas selama tahun 2018. Kegiatan ini diwakili oleh peserta dari seluruh UPT dan Direktorat dalam lingkup Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.



**c. FGD Pendidikan Bidang PAUD dan Dikmas**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas mengenai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**d. Penyiapan dan Penelaahan RKAKL Tingkat Eselon I dan Penyiapan Rencana Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2019**

Kegiatan ini dilaksanakan beberapa tahap dan hingga tengah tahun anggaran sudah terlaksana sebanyak 2 kali. Kegiatan ini guna menunjang penyiapan dokumen RKAKL tingkat eselon I dan rencana Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**e. Koordinasi Perencanaan Pusat (Kemendikbud–Kemenkeu-DPR –Bappenas)**

Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait dengan perencanaan pusat, seperti pelaksanaan RDP, pembahasan mengenai anggaran dengan Kemenkeu, dan penyiapan juknis SPM dengan Bappenas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**f. Asistensi Penelitian dan Penelaahan RKAKL dengan Kemenkeu Tahun Anggaran 2019**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi mengenai program dan anggaran dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**g. Asistensi Pelaksanaan Program dan Pengendalian Revisi Anggaran di UPT Tahun 2018**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan kontrol dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan. persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**h. Pokja Sinkronisasi Unit Pelaksana Teknis**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**i. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran**

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan bimbingan teknis mengenai perencanaan dan penganggaran di 29 UPT. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**j. Peningkatan Kapasitas Petugas Perencanaan UPT**

Kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan petugas UPT PAUD dan Dikmas bertujuan agar para petugas perencanaan pada UPT PAUD dan Dikmas memiliki kemampuan dalam merencanakan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran UPT PAUD dan Dikmas dapat terlaksana kegiatan tepat waktu, tepat sasaran, taat azas, transparan, dan akuntabel. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.



*Gambar 3*

*Foto kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Perencanaan UPT*



**k. Penyusunan KRISNA dan Reviu Output RKAKL**

Kegiatan ini sudah terlaksana, dan menghasilkan suatu bentuk sosialisasi dan penerapan aplikasi Krisna dalam penginputan RKAKL. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**l. Koordinasi dan Pengendalian Rapim B**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pertemuan terkait dengan pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan anggaran selama tahun berjalan di tingkat eselon II. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**m. Penyusunan Naskah Kebijakan dan Bahan Paparan**

Output yang dihasilkan berupa paparan-paparan yang menyajikan point-point penting terkait dengan kebijakan, pencapaian anggaran, kendala dan permasalahan serta solusi yang akan diambil guna mengatasi permasalahan tersebut. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**n. Penyusunan RKP 2019**

Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun rencana kinerja pemerintah tahun 2019. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

Pada tahun 2018, terdapat beberapa kegiatan yang dihapuskan seperti penyusunan buku perencanaan, Reviu Renstra dan Renja Ditjen PAUD Dikmas. Selain itu, terdapat penambahan kegiatan di komponen penyusunan program dan anggaran, yaitu pengelolaan DAK Ditjen PAUD dan Dikmas; pendampingan pengembangan model 4 tahap, penyusunan modul pendampingan pengembangan model, sinkronisasi program UPT PAUD Dikmas tahun 2019, Penyusunan Juknis Pemberian Dana Bantuan, Verifikasi dan Penilaian Penerima Dana Bantuan, Orientasi Teknis Penyelenggaraan, Tindak Lanjut Penelaahan Anggaran tahun 2019.

## 1.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sudah terealisasi sesuai target dengan rincian sebagai berikut :

### a. Asistensi Penyusunan Laporan Perkembangan

Upaya pencapaian target kinerja 29 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas yang berkontribusi pada capaian indikator kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas memerlukan pendampingan dalam prosesnya. Semua diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang pada akhirnya menjadi bahan menuju pelaksanaan siklus laporan yang baik dan sesuai aturan yang berlaku. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

### b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran PAUD dan Dikmas

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program dan anggaran PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

### c. Tim Evaluasi dan Pelaporan

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

### d. Penyusunan Instrumen Monev

Untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program kerja dan anggaran PAUD dan Dikmas pada unit kerja perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran PAUD dan Dikmas. Agar kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data dan informasi yang kredibel dan akurat, maka perlu dilakukan penyusunan instrumen yang diformulasikan dalam bentuk workshop dengan menghadirkan para narasumber yang memberikan gambaran serta informasi tentang penyusunan tema dan naskah instrumen monitoring dan evaluasi program dan anggaran Ditjen

PAUD dan Dikmas. Kegiatan Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2018. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**e. Rakor Evaluasi Pelaksanaan Program Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018**

Evaluasi program digunakan sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan implementasi manajemen kebijakan dan atau program untuk pengambilan suatu keputusan. Selain itu, juga sebagai perwujudan akuntabilitas kepada masyarakat, karena begitu pentingnya evaluasi capaian program Ditjen PAUD dan Dikmas pada tahun 2018, maka perlu dilakukan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan program PAUD dan Dikmas tahun 2018. Pelaksanaan rakor ini dibagi dalam tiga wilayah yaitu wilayah Timur dilaksanakan di Makassar Sulawesi Selatan, Wilayah Barat dilaksanakan di Batam Kepulauan Riau dan Wilayah Tengah yang dilaksanakan di Surabaya Jawa Timur.

Melalui kegiatan ini untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efektif dalam menjamin terselenggaranya layanan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas sesuai dengan arah kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas dan Dinas Pendidikan Kab/Kota. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.



*Gambar 4*

*Foto Kegiatan Rakor Evaluasi Pelaksanaan Program PAUD dan Dikmas Tahun 2018*

**f. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfinalkan Laporan Kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan laporan yang akuntabel terkait dengan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas selama satu tahun. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**g. Penyusunan Laporan Kinerja Tengah Tahunan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun draft Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas selama tengah tahun. Hal ini ditujukan untuk mempersiapkan laporan akhir kinerja yang siap untuk dicetak dan dilaporkan pada saat tahun anggaran sudah berakhir. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.



*Gambar 5*

*Foto Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Tengah Tahunan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018*

**h. Asistensi Penilaian dan Evaluasi SAKIP Ditjen PAUD dan Dikmas**

Kegiatan ini dilaksanakan di 29 UPT dan bertujuan untuk memberikan asistensi terhadap pelaksanaan SAKIP di satker. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**i. Penggandaan Buku Laporan Kinerja**

Laporan-laporan monev dan PUG yang telah dikompilasi dan dianalisis, disusun menjadi buku laporan kinerja. Buku ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan ketercapaian pelaksanaan program dan anggaran selama tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**j. Peningkatan Kapasitas Penyusun Laporan Kinerja**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi para petugas pelaporan terkait dengan penggunaan aplikasi pelaporan dan penyusunan laporan kinerja. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**k. Finalisasi Instrumen Monev**

Naskah kisi-kisi dan instrumen Monitoring dan Evaluasi tahun 2018 yang dihasilkan dari workshop pada tanggal 2 s.d. 4 Mei 2018 di Bogor Jawa Barat, yang bertujuan mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat tahun 2017/2018 masih perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan pengeditan dan penghalusan (harmonisasi) sehingga terwujud kisi-kisi dan instrumen yang komprehensif sesuai dengan tujuan monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan.

Memfinalisasi Instrumen yang telah disusun, tujuannya agar memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas merupakan suatu proses penting untuk mendapatkan data yang akurat, akuntabel dan kredibel. Sehingga tuntutan kualitas maupun secara kuantitas mutu program, akan terpenuhi dalam penyelenggaraan pelaksanaan program dan pengembangan PAUD dan Dikmas yang bermutu akan terpenuhi. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**I. FGD Pengolahan dan Analisa Data Monev**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengkompilasi, mengolah dan menganalisa data hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di lembaga-lembaga yang mendapat bantuan di tahun 2017 yang tersebar di kab/kota di Indonesia. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**m. Koordinasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**n. Temu Koordinasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan**

Kegiatan temu koordinasi pengarusutamaan gender yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan di kabupaten/kota tentang kebijakan, strategi dan isu-isu utama gender bidang pendidikan; meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan tentang pencapaian target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Pendidikan; meningkatkan kapasitas para perencana di kabupaten/kota dalam mengidentifikasi dan menyusun perencanaan dan penganggaran pendidikan yang responsive gender; dan meningkatkan capaian target layanan pendidikan melalui pendekatan Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan Responsif Gender (PPRG). Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**o. Uji Petik Pelaksanaan PUG**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 melakukan uji petik pelaksanaan PUG bidang pendidikan di 14 kabupaten/kota terpilih, untuk memetakan pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan di daerah, terutama di kabupaten/kota. Uji petik ini dilaksanakan pada Bulan Juli-Agustus 2018 dengan menugaskan sejumlah Pakar Gender Bidang Pendidikan.

Kegiatan Uji Petik Pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota ini secara umum bertujuan untuk mengetahui berbagai keberhasilan dan



kendala penyelenggaraan program Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

### **1.3 Pengolahan Data dan Informasi**

#### **a. Workshop Pemutakhiran DAPODIK PAUD dan Dikmas**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi: a) Dapodik PAUD dan Dikmas, b) Manajemen Dapodik PAUD dan Dikmas, c) Sistem Informasi Manajemen Dana Alokasi Khusus (SIM DAK) Fisik, dan d) SIM DAK Non Fisik BOP PAUD.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta workshop memiliki pemahaman, kesiapan dan komitmen untuk melaksanakan tugas pendataan lembaga PAUD dan Dikmas secara tuntas. Dengan demikian hasil Pendataan Lembaga PAUD dan Dikmas Tahun 2018 menjadi lebih lengkap, valid dan lebih akurat.

Kegiatan ini dilaksanakan di 4 regional: Makassar, Bali, Yogyakarta dan Batam melibatkan peserta berasal dari unsur staf Pendataan Dapodik PAUD dan Dikmas Kabupaten/Kota, staf yang menangani pendataan Dapodik PAUD dan Dikmas pada PP dan BP PAUD dan Dikmas, Tim Dapodik PAUD dan Dikmas Pusat dan tim pengembang Dapodik. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

#### **b. Workshop Pemetaan Mutu**

Workshop pemetaan mutu dilaksanakan dengan tujuan mensosialisasikan kebijakan pemetaan mutu PAUD dan Dikmas tahun 2018 serta mengkoordinasikan hasil pemetaan mutu yang dilaksanakan oleh PP dan BP PAUD dan Dikmas. Kegiatan ini dilaksanakan di Semarang, melibatkan peserta yang menangani pemetaan mutu di lingkungan Sekretariat dan Direktorat Ditjen PAUD dan Dikmas, PP/BP PAUD dan Dikmas, serta Tim pengembang aplikasi DAPODIK PAUD-DIKMAS. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**c. Workshop Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan suatu proses yang perlu dilakukan untuk menyajikan atau memanipulasi data ke bentuk yang lebih informatif. Pengolahan data meliputi input (entri data), pengolahan dan output atau penyajian data.

Kegiatan ini dilaksanakan di Banten dengan tujuan untuk melakukan:

a) Cleansing data Dapodik PAUD dan Dikmas; b) Penonaktifan satuan yang tidak aktif selama 4 semester, c) Penyesuaian data referensi PDSPK dengan referensi Ditjen PAUD dan Dikmas; d) Penambahan referensi khususnya untuk layanan Kursus dan Pelatihan (LKP); dan e) Verifikasi dan Validasi data SPNF Negeri selain TK.

Peserta kegiatan ini adalah perwakilan dari: Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Direktorat di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, Tim Pengembang Aplikasi Dapo PAUD dan Dikmas serta Tim Pengembang Aplikasi SIM PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**d. Bimtek Pemutakhiran Data**

Kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data PAUD dan Dikmas dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan operator Dapodik PAUD dan Dikmas tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan, di dalam menggunakan aplikasi Dapodik PAUD dan Dikmas serta aplikasi pendukung lainnya.

Kegiatan bimtek ini, lebih berfokus pada penyelesaian permasalahan teknis yang muncul di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam penggunaan aplikasi Dapodik dan aplikasi pendukung lainnya, terutama pada entri dan sinkronisasi data, serta mendorong satuan pendidikan untuk menuntaskan entri data secara benar dan lengkap sesuai keadaan di lapangan, sehingga menghasilkan data Dapodik yang berkualitas.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu bulan September dan Oktober di beberapa Kabupaten/Kota terpilih yang termasuk daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) atau daerah

dengan tingkat entry data yang rendah. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%

**e. Analisis SIM PAUD dan Dikmas**

Kegiatan Analisis Sistem Informasi Manajemen (SIM) PAUD dan Dikmas, dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis seluruh kebutuhan data PAUD dan Dikmas pada tahun 2018. Kegiatan Analisis SIM PAUD dan Dikmas kali ini, akan memfokuskan pada pengembangan aplikasi Dapodik PAUD dan Dikmas serta aplikasi supervisi.

Kegiatan ini dilaksanakan di Banten dengan melibatkan peserta dari Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat teknis di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah dan Jawa Barat, BP PAUD dan Dikmas Banten, PDSPK, BAN PAUD dan PNF serta 8. Tim Pengembang Aplikasi SIM PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**f. Desain SIM PAUD dan Dikmas**

Pengembangan aplikasi Dapodik PAUD dan Dikmas serta aplikasi pendukung lainnya, terus dilakukan dengan menyesuaikan struktur database, permasalahan yang terjadi serta masukan dari daerah. salah satunya yaitu perlu adanya aplikasi DapoPAUD versi *online* dan Dapodikmas versi *offline*, agar daerah-daerah di Indonesia dengan letak geografis yang sulit terjangkau dapat mengakses aplikasi Dapodik PAUD dan Dikmas sesuai kebutuhannya.

Kegiatan ini dilaksanakan di Anyer, Banten dengan tujuan untuk merancang, menyesuaikan desain layout struktur database aplikasi Dapodik PAUD dan Dikmas, serta aplikasi pemetaan mutu dan e-supervisi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Setditjen PAUD dan Dikmas perlu melaksanakan kegiatan Desain Sistem Informasi Manajemen (SIM) PAUD dan Dikmas.

Peserta kegiatan berasal dari Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas, PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat, PP PAUD

dan Dikmas Jawa Tengah, BP PAUD dan Dikmas Banten, PDSPK, BAN PAUD dan PNF, serta Tim Pengembang Aplikasi SIM PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**g. Uji Coba SIM PAUD dan Dikmas**

Kegiatan uji coba SIM PAUD dan Dikmas dilaksanakan untuk mengujicobakan hasil pengembangan aplikasi SIM PAUD dan Dikmas guna memenuhi kebutuhan organisasi khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

Tujuan kegiatan ini adalah: a) mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan aplikasi DapoPAUD online, Dapodikmas, SIM DAK Fisik dan SIM DAK BOP PAUD; b) memberikan informasi terbaru tentang aplikasi SIM PAUD dan Dikmas; c) mengidentifikasi berbagai hambatan dan kendala implementasi aplikasi; d) memberikan saran perbaikan terhadap aplikasi guna penyempurnaan aplikasi dan peningkatan kinerja pendataan.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota terpilih dengan tingkat entri data yang bagus sebagai apresiasi dan kabupaten/kota dengan tingkat entri data yang masih rendah untuk mendorong daerah memaksimalkan entri data di Dapodik. Pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur: a) Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, b) Tim Pengembang Aplikasi Dapodik PAUD dan Dikmas, c) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta d) Satuan Lembaga Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**h. QC dan Penyempurnaan Aplikasi SIM PAUD dan Dikmas**

Dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIM PAUD dan Dikmas, agar siap untuk diujicobakan, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas akan melaksanakan kegiatan Pengendalian Mutu / *Quality Control* dan Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) PAUD dan Dikmas. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyempurnakan beberapa aplikasi yang terdapat di dalam SIM PAUD dan Dikmas.

Kegiatan ini dilaksanakan di Solo melibatkan peserta berasal dari unsur: a) Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, b) PP/BP PAUD dan Dikmas, c) PDSPK, d) Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas, e) Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**i. Penyusunan Pedoman dan Panduan Aplikasi SIM PAUD dan Dikmas**

Seiring dengan kebutuhan pendataan yang dinamis dan untuk memudahkan pengguna (*user*) di dalam menggunakan aplikasi SIM PAUD dan Dikmas, Setditjen PAUD dan Dikmas perlu melaksanakan kegiatan Penyusunan Pedoman dan Panduan Aplikasi SIM PAUD dan Dikmas dengan melibatkan unsur-unsur terkait, antara lain tim pengembang, Pusat Data dan Statistik Kebudayaan Kemdikbud, serta tim dari Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyusun pedoman/panduan aplikasi SIM PAUD dan Dikmas meliputi aplikasi: 1) Dapodik PAUD dan Dikmas; 2) SIM DAK BOP PAUD dan 3) SIM DAK Fisik. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**j. Penyusunan Buku Data Pendidikan PAUD dan Dikmas**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun data-data yang dapat dijadikan buku informasi PAUD-DIKMAS, dan digunakan sebagai bahan pertimbangan menyusun kebijakan. Kegiatan dilaksanakan di anker banten, melibatkan peserta terdiri dari unsur staf/pejabat pada Setditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, dan PDSPK. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**k. Layanan Data dan Informasi**

Kegiatan ini bertujuan untuk melayani data dan informasi di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Layanan Data dan Informasi melibatkan tim ICT PAUD-Dikmas dan Tim pendukung aplikasi

Dapodik. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**I. Kesekretariatan Pendataan Tingkat Pusat**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**m. Tim Teknis PAUD dan Dikmas**

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan program PAUD dan Dikmas pada Bagian perencanaan dan Penganggaran perlu dibantu tim teknis kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**n. Sinkronisasi Data Pemetaan Mutu dan Persiapan Akreditasi BAP (Badan Akreditasi Provinsi)**

Salah satu upaya peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan PAUD dan Dikmas, adalah melalui akreditasi satuan pendidikan PAUD dan Dikmas di seluruh Indonesia. Untuk mempermudah proses akreditasi, BAN PAUD dan PNF telah membangun dan menyiapkan sebuah aplikasi bernama Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA). SISPENA merupakan pemetaan satuan pendidikan berdasarkan kesiapan akreditasi berdasarkan evaluasi diri. Selanjutnya, untuk meningkatkan sinergitas dan mengoptimalkan kinerja antar lembaga penjaminan mutu pendidikan, serta sosialisasi aplikasi SISPENA, Setditjen PAUD dan Dikmas mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Akreditasi Nasional PAUD dan Dikmas,. Kegiatan ini dilaksanakan di Semarang dengan melibatkan peserta dari: Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat teknis di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas, Kepala PP dan BP PAUD dan Dikmas, Staf yang menangani pemetaan mutu pada PP dan BP PAUD dan Dikmas, Ketua Badan Akreditasi Provinsi (BAP) seluruh Indonesia, serta Tim ICT Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.



**o. Pemutakhiran Dapodik SKB**

Dapodik PAUD dan Dikmas merupakan satu-satunya sumber data terpercaya dan akurat serta salah satu persyaratan yang digunakan dalam pemberian bantuan pemerintah, khususnya bantuan alokasi DAK Fisik SKB antara lain pembangunan gedung, renovasi dan rehab gedung, pengadaan peralatan praktik minimal 40 komputer di setiap SKB dan Alat Permainan Edukatif (APE) luar dan dalam. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih banyak terdapat SKB yang belum mengakses aplikasi Dapodik PAUD dan Dikmas, yang akan menyebabkan bantuan DAK Fisik SKB tersebut tidak akan terserap dengan maksimal.

Kegiatan ini bertujuan untuk: a) melakukan sosialisasi, simulasi dan pelatihan aplikasi Dapodik PAUD dan Dikmas kepada operator bagi SKB dan UPT PAUD dan Dikmas, b) membangun komitmen para operator bagi SKB untuk menuntaskan pendataan Dapodik PAUD dan Dikmas tahun 2018, c) memperkuat tim Dapodik UPT PAUD dan Dikmas untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada seluruh kabupaten/kota sehingga seluruh satuan pendidikan PAUD dan Dikmas dapat melakukan entri data dengan lengkap dan sesuai dengan keadaan di lapangan.

Kegiatan ini dilaksanakan di Banten, melibatkan peserta dari: Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, PP/BP PAUD dan Dikmas di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas serta Operator Dapodik PAUD dan Dikmas SKB (terpilih). Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**p. Penyusunan Grand Design Pengembangan SDM PAUD dan Dikmas**

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam rangka memberikan arahan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, perlu disusun Grand Desain Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui PAUD dan Dikmas.

Dengan tersusunnya Grand Desain ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas, efisien dan terukur kepada setiap pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap kemajuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan di Serang, Banten dengan melibatkan peserta berasal dari unsur: Direktorat di lingkungan ditjen PAUD dan Dikmas, Pusat Analisis dan Kebijakan (PASKA), Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan (Puslitjak) serta Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**q. Finalisasi Grand Design Pengembangan SDM PAUD dan Dikmas**

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Finalisasi Grand Desain Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui PAUD dan Dikmas adalah : a) Mereview Draft Grand Desain Pengembangan SDM, b) Memperoleh masukan untuk Finalisasi Grand Desain Pengembangan SDM dan c) Memfinalkan Grand Desain Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui PAUD dan Dikmas. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta, dengan melibatkan peserta dari: Direktorat teknis di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, Kepala PP/BP-PAUD dan Dikmas di Seluruh Indonesia, Lembaga PAUD dan Dikmas terpilih, serta Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**1.4 Pengelolaan Keuangan**

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan sudah terealisasi sesuai target dengan rincian sebagai berikut :

**a. Koordinasi/Konsultasi/Pengurusan Administrasi Keuangan**

Koordinasi pengurusan administrasi keuangan yang di lakukan setiap saat baik sebelum dan sesudah proses pencairan anggaran, serta konsultasi tentang aturan baru yang di keluarkan oleh pihak terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.



**b. Asistensi dan Pembinaan Pengelolaan APBN (Tata Kelola, Pencairan, Pelaksanaan dan Pelaporan)**

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pembinaan satuan kerja Ditjen PAUD dan dikmas untuk tercapainya tata kelola, pencairan, pelaksanaan dan pelaporan yang akuntabel. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**c. Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara**

Aturan-aturan baru dari pihak terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan harus di sosialisasikan terhadap satuan kerja yang ada di Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**d. SPEM Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawas/Pemeriksa**

Pendataan dan monitoring Laporan keuangan dan Tindak lanjut dari temuan aparat pengawas yang harus di selesaikan demi tercapainya Laporan keuangan yang baik dan akuntabel. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**e. Rekonsiliasi Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawas/Pemeriksa**

Kegiatan yang selalu dilakukan setiap kali ada satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD dan dikmas memberikan tanggapan dan tindak lanjut penyelesaian dari temuan yang ada. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**f. Asistensi Pelaksanaan PNBPN**

Asistensi pemberian pemahaman kepada satuan kerja tentang tata cara pelaksanaan, penerimaan, penyetoran serta penggunaan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada di masing-masing satuan kerja di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**g. Penyusunan Tarif PNPB**

Kegiatan penyusunan tarif PNPB dengan melibatkan pihak-pihak terkait baik itu pihak external maupun internal yang dalam hal ini dapat mendukung proses terselesainya tarif PNPB di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**h. Pelaksanaan SPI**

Pelaksanaan proses pengendali internal yang bertujuan untuk memastikan dan mengawasi setiap program dan kegiatan yang di miliki oleh masing-masing satuan kerja dapat berjalan dengan baik. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**i. Penyusunan Program, Penyusunan Laporan Pemantauan tim SPI Terhadap Pengelolaan Anggaran Penyusunan Laporan Akhir Tim SPI**

Kegiatan internal TIM SPI Ditjen PAUD dan Dikmas dalam penyusunan hasil pemantuan yang akan dituangkan menjadi sebuah Laporan akhir tahun tim SPI itu sendiri. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**j. Penyusunan dan Evaluasi Rencana dan Program Bagian Keuangan dan BMN**

Kegiatan internal Bagian Keuangan dan BMN terkait penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan yang sudah dan akan dilakukan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**k. Tim TP TGR**

Tim yang dibentuk untuk dapat menelusuri dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi dari pegawai yang menjadi pihak tertagih dan harus menyelesaikan tagihan tersebut. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.



**I. Sosialisasi Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun**

Kegiatan rutin dilakukan terkait proses pengelolaan dan pencairan anggaran di akhir tahun yang harus disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**m. Bimbingan Teknis Aplikasi SAI dan SIMAK BMN**

Bimbingan teknis bagi petugas penyusun Laporan keuangan satuan kerja untuk terwujudnya SDM satuan kerja yang mampu berinteraksi dan bekerja lebih maksimal dalam menyusun Laporan keuangan satuan kerjanya. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**n. Koordinasi dan Penyelesaian Hibah langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**o. Penyusunan Laporan Bulanan SAI dan SIMAK BMN**

Laporan Bulanan SAI dan SIMAK BMN satker Setditjen PAUD dan Dikmas yang harus disusun dan diselesaikan sebagai dasar satker Setditjen PAUD dan Dikmas melakukan proses pencairan anggaran di bulan berikutnya. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**p. Penyusunan Laporan Triwulanan (I&III) SAI**

Agenda penyusunan laporan triwulan I dan III untuk mengetahui dan mengontrol Laporan keuangan satuan kerja yang ada di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**q. Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan SAI dan SIMAK BMN Satker Sekretariat**

Laporan semesteran dan tahunan SAI dan SIMAK BMN satker Sekretariat yang rutin dilakukan untuk mendukung Laporan Akhir

Tahun Laporan Keuangan tingkat Eselon 1. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**r. Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan dan SIMAK BMN Eselon 1**

Kegiatan penyusunan Laporan Semester dan Tahunan dan SIMAK BMN Eselon 1 dengan melibatkan satuan kerja yang ada untuk nantinya akan dikompilasi menjadi satu laporan Eselon 1. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**s. Penyusunan Laporan Audited SAI dan SIMAK BMN**

Kegiatan penyusunan laporan audited SAI dan SIMAK BMN yang dilakukan setelah mendapatkan koreksi perbaikan dari pihak pemeriksa dalam hal ini BPK-RI. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**1.5 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal**

Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal sudah terealisasi sesuai target dengan rincian sebagai berikut :

**a. Sinkronisasi Program Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas**

Kegiatan ini dilakukan untuk mengharmonisasi dan menyepakati program-program penataan dan penguatan organisasi khususnya bidang hukum, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Kemendikbud diperlukan sinkronisasi dan sinergi antara satuan kerja di lingkungan Kemendikbud dengan Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemendikbud yang merupakan motor penggerak terhadap penataan dan penguatan organisasi. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**b. Penyusunan dan Uji Publik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang PAUD dan Dikmas**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebijakan Presiden, kebijakan Menteri, maupun ketentuan



yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen PAUD dan Dikmas. Peraturan perundangan-undangan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, maka perlu adanya penyusunan uji publik, reviu dan finalisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang PAUD dan Dikmas**

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUD dan Dikmas) perlu di dukung oleh suatu peraturan perundang-undangan, agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik di masyarakat ataupun pemangku kepentingan perlu untuk mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**d. Fasilitasi Bantuan Hukum dan Permasalahan Hukum Bidang PAUD dan Dikmas**

Resiko hukum atas pelaksanaan tugas pelayanan oleh para pegawai maupun instansi pemerintah memerlukan upaya penjaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum, sehingga diharapkan ada keamanan, kenyamanan sekaligus peningkatan kinerja para pegawai dan atau instansi pemerintah. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**e. Sosialisasi Manajemen ASN dan Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas**

Manajemen ASN dan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas perlu di dukung oleh suatu peraturan perundang-undangan, agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya sosialisasi manajemen ASN dan pembinaan jabatan fungsional, diikuti UPT Ditjen PAUD dan Dikmas dan

Direktorat di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas serta Setditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**f. Koordinasi dan Harmonisasi Bidang Hukum Ditjen PAUD dan Dikmas**

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, pencapaian standar hasil secara teknis operasional membutuhkan adanya norma/hukum sebagai standar penilaian kinerja layanan pendidikan. Dalam pendekatan sistem hukum, pelaksanaan layanan melibatkan banyak kepentingan sehingga perlu adanya koordinasi dan harmonisasi bidang hukum khususnya peraturan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan layanan pendidikan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**g. Monitoring dan Evaluasi Hukum Dan Perundang-Undangan Bidang PAUD dan Dikmas**

Monitoring dan evaluasi hukum dan peraturan bidang PAUD dan Dikmas dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan memitigasi terjadinya permasalahan hukum dalam penerapan dan pelaksanaan peraturan, sebagai upaya pencegahan dan memberi pemahaman kepada pemangku kepentingan sekaligus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebelum terjadinya permasalahan hukum. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**h. Evaluasi Organisasi di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas**

Evaluasi organisasi diarahkan untuk mengungkap gambaran visi dan misi serta strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga melalui empat aspek, yaitu: proses internal, pengguna layanan, pemangku kepentingan, dan organisasi pembelajar dengan sekaligus melihat tujuan jangka panjang. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.



**i. Evaluasi Penerapan SOP dan Standar Pelayanan Publik Ditjen PAUD dan Dikmas**

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mengatur bahwa prosedur operasional standar yang sudah disusun oleh unit kerja secara berkala dilakukan evaluasi, setiap unit utama diminta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (POS) yang sudah diterapkan secara berkala. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%..

**j. Manajemen ISO 9001:2016**

Merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek - praktek standar untuk manajemen sistem, yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**k. Penyusunan laporan implementasi RBI di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas**

Setelah dilakukan evaluasi oleh KemenPAN dan RB terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ditjen PAUD dan Dikmas, maka disusun laporan hasil pelaksanaan RBI tahun 2018 di masing-masing satuan kerja yang berdasarkan 8 area perubahan yaitu: manajemen perubahan, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM Aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan penguatan pelayanan publik. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**l. Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas**

Analisis jabatan memberikan informasi yang berguna untuk menentukan syarat-syarat tenaga kerja secara kualitatif. Analisis

jabatan menunjukkan jenis-jenis jabatan dan karyawan-karyawan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan analisis beban kerja adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dari masing-masing organisasi, yang harus dibuat oleh suatu satuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**m. Uji Petik Jabatan Fungsional Widyaprada**

Merupakan studi beban kerja untuk mendapatkan volume kerja dan waktu yang dibutuhkan pada masing-masing kegiatan, volume dan waktu yang dibutuhkan digunakan untuk menentukan waktu kerja efektif pada setiap jenjang jabatan, waktu kerja efektif adalah jam/tahun. Hasil olahan volume dan waktu yang dibutuhkan untuk menetapkan besaran angka kredit setiap kegiatan Jabatan Fungsional Widyaprada. Kegiatan ini mendapatkan hambatan, bahwa draft Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Widyaprada belum disahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga berakibat kepada draft Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaprada tidak bisa disahkan juga oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini berakibat ada sisa anggaran untuk pencetakan kedua peraturan tersebut yang tidak bisa dilaksanakan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**n. Penyusunan Petunjuk Teknis BP PAUD dan Dikmas**

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, dibutuhkan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana kerja agar tepat sasaran sesuai dengan target capaian yang tertuang dalam Rencana Strategis maupun dalam Rencana Kerja. Kegiatan ini mendapatkan hambatan, bahwa draft Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Widyaprada belum disahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga berakibat kepada draft Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaprada tidak bisa disahkan juga oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini berakibat ada sisa anggaran untuk pencetakan peraturan tersebut yang tidak bisa dilaksanakan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**o. Koordinasi dan harmonisasi bidang tata laksana Ditjen PAUD dan Dikmas**

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, pencapaian standar hasil sebagaimana dimaksud dalam renstra, secara teknis operasional membutuhkan adanya standar penilaian kinerja layanan pendidikan dan adanya tata laksana sebagai standar proses layanan. Sehingga perlu adanya koordinasi dan harmonisasi bidang tatalaksana yang diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan layanan pendidikan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**p. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan dan Penguatan Organisasi Ditjen PAUD dan Dikmas**

Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kendala penggunaan prosedur dan memberikan rekomendasi perbaikan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindak lanjut penyelesaian kendala dan mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**1.6 Pengelolaan Kepegawaian**

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kepegawaian sudah terealisasi sesuai target dengan rincian sebagai berikut :

**a. Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat II**

Kegiatan ini berupa Diklat dalam jabatan yaitu diklat kepemimpinan yang biasa disebut Diklatpim II dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah pada

jenjang jabatan struktural eselon II. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**b. Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Pamong Belajar Ditjen PAUD dan Dikmas**

Kegiatan ini merupakan pengurusan administrasi terkait penilaian angka kredit pamong belajar yang berada di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**c. Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Belajar**

Merupakan proses pengangkatan PNS yang memiliki pengalaman dan/atau masih menjalankan tugas di bidang PAUD dan Dikmas berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang, menjadi Jabatan Fungsional Pamong Belajar guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**d. Pendidikan dan Pelatihan Pamong Belajar Ditjen PAUD dan Dikmas**

Pembinaan terhadap pegawai negeri khususnya tenaga fungsional Pamong Belajar sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pembinaan dimulai dengan adanya pendidikan dan pelatihan (diklat). Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**e. Peningkatan Kompetensi Pegawai Ditjen PAUD dan Dikmas**

Pembinaan pegawai perlu dilakukan baik untuk pegawai yang sudah lama maupun pegawai yang baru bekerja, karena pembinaan tersebut merupakan tugas seorang pimpinan dalam usaha untuk menggerakkan para bawahan supaya mereka dapat dan mau bekerja dengan baik. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.



**f. Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas**

Diklat Pengelolaan Kepegawaian merupakan diklat teknis tentang tata cara serta prosedur pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dengan narasumber berasal dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**g. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Non Klasikal**

Diklat Kepemimpinan Non Klasikal merupakan jenis latihan di alam terbuka (*out door*) untuk pengembangan diri (*self development*) yang disimulasi melalui permainan-permainan edukatif (*educative game*) baik secara individual maupun kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, berpikir kreatif, rasa kebersamaan, tanggungjawab, komunikasi, rasa saling percaya, dll. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**h. Manajemen ISO 9001:2008**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**i. Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan PAUD dan Dikmas**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**j. Koordinasi dan Harmonisasi Bidang Tata Laksana Ditjen PAUD Dikmas**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**k. Analisis Kebutuhan Formasi Pegawai Tahun 2019**

Pelaksanaan analisis kebutuhan formasi pada hakekatnya diharapkan agar terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap unit kerja serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**l. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas**

Pengadaan CPNS merupakan usaha untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan kompetitif dalam jumlah dan kualifikasi yang tepat tidak terlepas pada proses perencanaan dan pengadaan SDM yang dapat dikatakan sebagai langkah awal pencapaian tujuan organisasi. Dengan perencanaan yang tepat diharapkan kontribusi SDM akan meningkat sebanding atau melebihi pembiayaan (*cost*) yang dipergunakan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**m. Pelantikan, Sumpah/Janji Jabatan atau PNS, serta Serah Terima Jabatan**

Pelantikan sumpah/janji jabatan atau PNS dan serah terima jabatan adalah mengikat secara moral terhadap Tuhan Yang maha Esa dan dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I dan disaksikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**n. Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas**

Pembinaan pegawai perlu dilakukan baik untuk pegawai yang sudah lama maupun pegawai yang baru bekerja, maka pembinaan terhadap pegawai negeri sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas



dan fungsinya dengan baik sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**o. Badan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan dan Kepangkatan**

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) yang memiliki tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah, penetapan peserta Diklatpim dan penetapan seleksi calon peserta Diklatpim II ke bawah. Yang diketuai oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**p. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah**

Kegiatan ini berupa penyelenggaraan ujian dinas untuk mempertimbangkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi atas prestasi kerja serta pengabdian terhadap negara. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagai sarana untuk mempertimbangkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi atas berdasarkan pendidikan yang telah ditempuh dibuktikan dengan ijazah yang dimilikinya. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**q. Koordinasi dan Harmonisasi Bidang Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas**

Dalam pendekatan sistem kepegawaian, pelaksanaan layanan melibatkan banyak kepentingan sehingga perlu adanya koordinasi dan harmonisasi bidang kepegawaian. Harmonisasi kepegawaian diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan layanan pendidikan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**r. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas**

Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kendala penggunaan prosedur dan memberikan rekomendasi perbaikan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindak lanjut penyelesaian kendala dan mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**s. Pengembangan Aplikasi Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas**

Pengembangan aplikasi kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas merupakan pengembangan aplikasi kepegawaian yang sudah ada untuk dilengkapi sesuai kebutuhan urusan administrasi kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**1.7. Pelayanan Umum dan Perlengkapan**

Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum dan perlengkapan sudah terealisasi sesuai target dengan rincian sebagai berikut :

**a. Koordinasi Konsultasi/Pengurusan Administrasi BMN**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**b. Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN Ditjen PAUD dan Dikmas**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**c. Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2020**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**d. Operasional Unit Layanan Pengadaan**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**e. Pendampingan Pengadaan Berbasis TIK**

Kegiatan pendampingan berbasis Teknologi informasi dan komunikasi khususnya yang terkait dengan sistem baru tentang pengadaan baik itu yang dikeluarkan oleh Biro Kemendikbud maupun dari pihak Kementerian Keuangan. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**f. Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Milik Negara**

Kegiatan peningkatan kapasitas pengelola Barang Milik Negara masing-masing satuan kerja yang output dari kegiatan ini adalah setiap pegawai yang lulus akan mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa dari pihak LKPP, dimana sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi satuan kerja mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa di satuan kerjanya. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**g. Pemutakhiran Data BMN**

Kegiatan pemutakhiran data Barang milik negara di masing-masing satuan kerja Ditjen PAUD dan Dikmas yang dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan data terbaru tentang Barang Milik Negara yang ada di Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**h. Penghapusan BMN**

Kegiatan penghapusan Barang Milik Negara yang dimiliki oleh satuan kerja dengan tujuan menghapuskan barang yang memang sudah tidak layak pakai dengan ketentuan harus sesuai peraturan yang berlaku. Penyusunan Profil, NSPK, Juknis dan Buku Ditjen PAUD dan Dikmas

Kegiatan tahunan Penyusunan profil NSPK, Juknis dan Buku Ditjen PAUD dan Dikmas yang di dalamnya berisikan Norma, standar, prosedur dan Kriteria pekerjaan yang ada di Satker Setditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**i. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan BMN Ditjen PAUD dan Dikmas**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**1.8 Pelayanan Rumah Tangga**

Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Rumah Tangga sudah terealisasi sesuai target dengan rincian sebagai berikut :

**a. Evaluasi Program Hemat Energipada UPT PAUD dan Dikmas**

Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud mendorong seluruh satker untuk menggunakan energi dengan efektif dan efisien. Untuk mengetahui dan mengontrol satker dalam penggunaan energi, maka Bagian Umum dan Kerja Sama, Setditjen PAUD dan Dikmas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada seluruh satker, termasuk 29 UPT PAUD dan Dikmas. Dengan adanya kegiatan monev ini, penggunaan energi listrik yang digunakan oleh satker dapat terkontrol dengan baik. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**b. Penyusunan Juknis Hemat Energi**

Dalam rangka memudahkan satker yang terdapat di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas untuk melaksanakan kegiatan hemat energi, maka Bagian Umum dan Kerja Sama, menyusun petunjuk teknis hemat energi. Juknis ini disusun agar mempermudah para pegawai terkait dengan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program hemat energi. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**c. Penguatan Regulasi K5**

Dengan telah diberlakukannya Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dirasa perlu untuk menyusun serta mengembangkan berbagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bagi penyelenggaraan kegiatan subbag Rumah Tangga di Bagian Umum dan Kerja Sama di lingkungan Direktorat Jenderal



Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Salah satu NSPK yang telah dibuat yaitu NSPK terkait dengan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan Kerapihan.

Dalam memperkuat implementasi pelaksanaan NSPK tersebut, maka diperlukan regulasi yang mengatur khusus terkait dengan K5. Oleh karena itu, Subbagian Rumah Tangga melaksanakan kegiatan penguatan regulasi K5, agar terumuskan peraturan dalam melaksanakan K5 bagi seluruh UPT PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**d. Implementasi Pengelolaan K5/ Regional**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 dan NSPK K5 yang telah disusun oleh Setditjen PAUD dan Dikmas, maka seluruh satker harus menerapkan dan mengimplementasikan K5 pada aktivitas pekerjaan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan K5 pada satker di Ditjen PAUD dan Dikmas diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi kepada seluruh satker tersebut. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**e. Penataan Arsip Gedung Arsip Ciganjur**

Pengelolaan arsip pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sampai saat ini dalam tahap proses penataan yang lebih baik. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) SDM belum terpenuhi secara kualitas dan kuantitas, 2) semakin berkembang dan kompleksnya jenis arsip yang tercipta dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, dan 3) kurangnya tempat/fasilitas penyimpanan arsip yang memadai, sehingga arsip menumpuk yang berakibat pada sulitnya dalam penemuan kembali. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**f. Pemusnahan Arsip**

Keterbatasan ruang simpan terkait pengelolaan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat seharusnya diantisipasi dengan kegiatan penyusutan arsip terhadap arsip-arsip yang disimpan, sehingga tidak terjadi penumpukan arsip di meja ruang kerja, sudut ruangan, tangga gedung.

Penemuan kembali terhadap arsip yang dibutuhkan menjadi sulit dilaksanakan, karena arsip belum tertata sesuai dengan tata kelola kearsipan, sehingga terjadi penumpukan arsip, dikarenakan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan akibat tidak dilaksanakannya penyusutan arsip. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**g. Bimbingan Teknik Pengelolaan Kearsipan Elektronik**

Pengelolaan arsip di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sampai saat ini belum dilaksanakan dengan baik. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) SDM belum terpenuhi secara kualitas dan kuantitas, 2) semakin berkembang dan kompleksnya jenis arsip yang tercipta dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, dan 3) kurangnya tempat/fasilitas penyimpanan arsip yang memadai, sehingga arsip menumpuk yang berakibat pada sulitnya dalam penemuan kembali.

Pada saat ini pengelolaan kearsipan di Ditjen PAUD dan Dikmas telah berjalan secara konvensional. Dalam sistem kearsipan konvensional tentunya banyak melibatkan petugas kearsipan untuk mengelola dan melayani kebutuhan informasi arsip, dan hal ini belum menjamin kecepatan dan ketepatan dalam sistem pencarian arsip, karena persuratan melalui manual yang memerlukan waktu yang tidak efisien dan terbatas.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan bimbingan teknis pengelolaan kearsipan pada UPT Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**h. Pendampingan Pemusnahan Arsip pada UPT Ditjen PAUD dan Dikmas**

Ditjen PAUD dan Dikmas memiliki 29 UPT PAUD dan Dikmas yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. UPT Tersebut tentunya dalam menjalankan aktivitas perkantoran akan ada dokumen yang diarsipkan. UPT PAUD dan Dikmas yang telah berdiri sudah lama, tentunya memiliki arsip yang harus segera dimusnahkan, tentunya dalam memusnahkan arsip tersebut harus ada pendampingan dari Setditjen PAUD dan Dikmas, dalam hal ini Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Umum dan Kerja Sama. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**i. Workshop Penyusunan Format Surat Dinas yang Baik dan Benar**

Surat resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Unit Utama, atau Unit Pelaksana Teknis memiliki aturan dan standard yang harus di penuhi.

Oleh karena itu, Sub Bagian Tata Usaha, Setditjen PAUD dan Dikmas sesuai dengan Permendikbud No 11 Tahun 2015, melaksanakan kegiatan workshop penyusunan format surat dinas yang baik dan benar. Hal tersebut bertujuan supaya pegawai yang diberi tugas untuk membuat surat memiliki kemampuan dalam membuat surat sesuai dengan standard yang semestinya. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**j. Penguatan Pengelolaan E-office pada UPT Ditjen PAUD dan Dikmas**

Aplikasi *E-Office* adalah sebuah sistem persuratan digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk meningkatkan layanan persuratan di Kemendikbud dan penguatan kebijakan *e-government*. Dengan adanya aplikasi *E-Office* ini diharapkan dapat membantu pegawai dalam meminimalisir terjadinya kehilangan dokumen, memudahkan pencarian dan pelacakan dokumen, mempercepat respon terhadap suatu layanan, dan juga dapat menjaga kerahasiaan informasi.

Dalam penggunaannya, banyak pegawai UPT PAUD dan Dikmas yang belum memiliki kemampuan dalam menggunakan *e-office*. Oleh karena itu, Setditjen PAUD dan Dikmas melakukan pendampingan kepada 29 UPT PAUD dan Dikmas dalam menggunakan aplikasi *e-office*. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**k. Sosialisasi E-perpustakaan**

Perpustakaan Digital Ditjen PAUD dan Dikmas mengacu pada aplikasi yang dikembangkan oleh Perpustakaan Kemendikbud. Oleh karena itu Ditjen PAUD dan Dikmas memandang perlu untuk mensosialisasikan kebijakan perpustakaan digital kepada seluruh satuan kerja. Perpustakaan digital yang dimaksud adalah aplikasi perpustakaan yang dikembangkan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain SLiMs (*Senayan Library Management Sistem*), Repositori Institusi, dan Jurnal Elektronik Kemendikbud.

Sejalan dengan itu, Bagian Umum dan Kerja Sama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagai pembina fungsi perpustakaan di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas akan melaksanakan sosialisasi perpustakaan digital Kemendikbud kepada seluruh satker di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas agar pengelola perpustakaan dapat menjalankan aplikasi E-Perpustakaan di satuan kerja masing-masing. Hal ini dapat menjadi suatu langkah dan upaya nyata menjalankan tugas dan fungsi perpustakaan Ditjen PAUD dan Dikmas untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**l. Evaluasi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama PAUD dan Dikmas**

Ditjen PAUD dan Dikmas dirasa perlu melakukan evaluasi penyelenggaraan yang telah dilaksanakan oleh SPK/Lembaga yang telah melaksanakan selama 3 tahun penyelenggaraan. Evaluasi



dirasa perlu mengingat bahwa apakah terdapat kesesuaian antara RIP yang telah dikirimkan kepada Ditjen PAUD dan Dikmas pada saat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan dengan pelaksanaan yang telah dilaksanakan selama 3 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dikmas melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan SPK PAUD. Kegiatan ini diharapkan mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan yang dilaksanakan SPK PAUD selama 3 tahun terakhir. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**m. Fasilitasi Pengembangan/Sosialisasi/Perluasan Model Ditjen PAUD dan Dikmas**

Ditjen PAUD dan Dikmas melalui Unit Pelaksana Teknis yang terdapat di 29 provinsi memiliki tugas dan fungsi dalam mengembangkan model-model pembelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Model-model tersebut tentunya harus disosialisasikan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu tentunya diperlukan fasilitasi pengembangan dan perluasan Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**n. Fasilitasi Kerja Sama Antar Instansi/Lembaga**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan bahan rekomendasi izin penyelenggaraan kursus PMA, rekomendasi izin belajar peserta didik asing, dan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, Subbagian kerja sama melibatkan berbagai macam pihak. Misalnya, dalam pemberian izin belajar peserta didik asing, subbagian kerja sama melibatkan unsur dari Biro PKLN, Unit Layanan Terpadu, Subbag Hukum Setditjen PAUD dan Dikmas. Kemudian, untuk publikasi dan kehumasan melibatkan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Lembaga di Bidang PAUD dan Dikmas, dll. Sedangkan, untuk pemberian izin penyelenggaraan kursus PMA, Subbag Kerja Sama melibatkan unsur dari Subbag Hukum Setditjen PAUD dan

Dikmas, Biro Hukum Kemendikbud, BKPM, dan dari penyelenggara kursus.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diperlukan adanya koordinasi, konsolidasi antara Sub Bagian Kerja Sama dengan pihak yang terkait. Diharapkan dengan adanya koordinasi dan konsolidasi yang baik, dapat mempercepat dan melancarkan tugas dan fungsi tersebut. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh Setditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan secara berhasil dan berdaya guna serta sesuai dengan manfaat sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**o. Fasilitasi Pelaksanaan Tanggap Darurat**

Ditjen PAUD dan Dikmas sesuai dengan Permendikbud No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kemendikbud memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Tugas dan fungsi tersebut tentunya dalam rangka mendukung visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 yaitu terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong.

Oleh karena itu, Ditjen PAUD dan Dikmas mempunyai tugas untuk membantu satuan PAUD dan Dikmas yang terkena bencana. Satuan PAUD dan Dikmas yang terkena dampak bencana harus dibantu agar dapat mampu melaksanakan proses kegiatan pembelajarannya kembali. Maka dari itu, diperlukan program atau kegiatan pelaksanaan tanggap darurat oleh Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**p. Kerja Sama dengan TNI dalam rangka Pendidikan Karakter**

Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter



siswa, selain itu pendidikan karakter dapat juga diartikan suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Dalam upaya meningkatkan pendidikan karakter peserta didik ataupun masyarakat, Ditjen PAUD dan Dikmas bekerja sama dengan Tentara Nasional Republik Indonesia. Mengingat bahwa TNI memiliki akses untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terluar dan terpencil. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**q. Sekretariat Satuan Karya Widya Budaya Bakti(SWBB)**

Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan kaum muda menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila dan berperan serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara, perlu membekali anggotanya dengan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional;

Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013 telah menetapkan pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) Widya Budaya Bakti sebagai wadah pembinaan kaum muda dalam memberikan keterampilan khusus di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk kelancaran program kegiatan Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional, maka diperlukan dukungan berbagai pihak, terutama tim sekretariat Saka Widya Budaya Bakti. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**r. Pelantikan Pangkalan SAKA**

Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan kaum muda menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila dan berperan serta dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara, perlu membekali anggotanya dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional.

Dalam rangka kelancaran dan kemajuan gerakan pramuka, khususnya Saka Widya Budaya Bakti di tingkat Kwarcab dan Kwarda

di Seluruh Indonesia, diperlukan dukungan dari pengurus pimpinan Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional, sehingga Pembina Gerakan Pramuka di daerah dapat melaksanakan program sesuai dengan tujuan terbentuknya Saka Widya Budaya Bakti. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**s. Sosialisasi SWBB Tahun 2018**

Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan kaum muda menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila dan berperan serta dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara, perlu membekali anggotanya dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional.

Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013 telah menetapkan pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) Widya Budaya Bakti sebagai wadah pembinaan kaum muda dalam memberikan keterampilan khusus di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk mengenalkan Saka Widya Budaya Bakti kepada masyarakat luas, maka diperlukan sosialisasi SWBB diberbagai kegiatan pramuka. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**t. Sosialisasi NSPK Ditjen PAUD dan Dikmas**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 244 huruf c, yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan dan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Serta



pasal 244 huruf f, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, maka pada tahun 2018 Bagian Umum dan Kerja Sama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat akan melakukan Sosialisasi NSPK Ditjen PAUD dan Dikmas yang terkait dengan bidang Rumah Tangga. Hal ini dapat menjadi suatu langkah dan upaya nyata untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik khususnya Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**u. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan ULT bagi UPT PAUD dan Dikmas**

Ditjen PAUD dan Dikmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 29 UPT PAUD dan Dikmas yang tersebar di berbagai provinsi. Untuk memudahkan masyarakat di berbagai daerah untuk melakukan berbagai pengaduan atau layanan kepada Kemendikbud atau dalam hal ini Ditjen PAUD dan Dikmas maka dapat melalui ULT yang tersedia di UPT. Selain itu, ULT dapat memudahkan UPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang akan mengakses berbagai program yang disediakan oleh UPT.

Dalam pelaksanaannya, tentu diperlukan pegawai yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya kegiatan peningkatan kapasitas pegawai yang ditugaskan untuk menjadi pengelola unit layanan terpadu bagi 29 UPT PAUD dan Dikmas. Meningkatkan kemampuan pegawai, sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**v. Penguatan ULT di 29 UPT PAUD dan Dikmas**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Publik, layanan masyarakat yang

meminta informasi dan menyampaikan pengaduan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditangani melalui satu pintu melalui Pusat Informasi dan Humas. Sementara itu, layanan pendidikan lainnya seperti tunjangan sertifikasi guru, dapodik, NRG, NISN, bansos, dll masih ditangani oleh unit kerja masing-masing di Kemendikbud.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka layanan pendidikan dan kebudayaan yang ditangani unit kerja masing-masing di lingkungan Kemendikbud dikelola oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kemendikbud.

Ditjen PAUD dan Dikmas harus terus memonitoring ULT yang diselenggarakan oleh UPT PAUD dan Dikmas. Oleh karena itu, diperlukan adanya kegiatan untuk penguatan ULT sebagai langkah menjaga kualitas dari penyelenggaraan ULT. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**w. Rakornas SWBB Tahun 2018**

Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan kaum muda menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila dan berperan serta dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara, perlu membekali anggotanya dengan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional.

Dalam rangka kelancaran dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka, khususnya Saka Widya Budaya Bakti di tingkat Kwarda dan Kwarda di Seluruh Indonesia, diperlukan dukungan dari pengurus pimpinan Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional, sehingga Pembina Gerakan Pramuka di daerah dapat melaksanakan program sesuai dengan arahan dari pusat.

Mengingat kegiatan program pramuka SWBB sangat penting, maka akan dilakukan rapat koordinasi nasional Saka Widya Budaya Bakti Nasional. Dengan harapan dapat tercipta program dan kegiatan yang

lebih baik dalam membangun karakter anak bangsa. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.



Gambar 6

Foto Kegiatan Rakornas SWBB 2018

**x. Pengembangan Aplikasi Perizinan Berbasis online**

Setiap tahunnya banyak penyelenggara satuan PAUD dan Dikmas yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan SPK PAUD, izin penyelenggaraan kursus dengan modal asing, izin belajar peserta didik asing, dan izin belajar peserta didik asing untuk lembaga kursus. Permohonan-permohonan tersebut kemudian di proses oleh Sub Bagian Kerja Sama, Bagian Umum dan Kerjasama, yang diberikan kewenangan oleh Ditjen PAUD dan Dikmas. Bagi lembaga yang telah memenuhi persyaratan, maka izin-izin tersebut akan segera dikeluarkan atau diterbitkan.

Sampai sekarang ini proses pengajuan perizinan di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas masih menggunakan cara tradisional yaitu dengan mengajukan atau mengirimkan berkas. Banyak penyelenggara satuan PAUD dan Dikmas yang mengeluh akan penggunaan cara tersebut. Penyelenggara satuan PAUD dan Dikmas yang berasal dari berbagai daerah merasa kesulitan dikarenakan harus langsung mengirimkan berkas kepada Kemendikbud. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dan mempercepat proses layanan perizinan di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas harus beralih kepada layanan yang sifatnya online.

Terkait dengan hal tersebut, Sub Bagian Kerja Sama Bagian Umum dan Kerja Sama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melakukan kegiatan pengembangan aplikasi perizinan berbasis online. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**y. Rakor TMMD**

Secara umum kegiatan ini berbentuk kegiatan Asistensi Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD). Dalam hal ini Tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen PAUD dan Dikmas) sesuai dengan tujuannya melakukan kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan melakukan pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat secara umum di daerah sasaran TNI Manunggal Membangun Desa. Dalam rangka berpartisipasi aktif dan ikut serta mensukseskan kegiatan pelaksanaan TMMD tahun 2018 khususnya di bidang kegiatan non fisik, dan untuk memperluas akses pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat berupaya memberikan layanan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat bagi masyarakat yang masih belum terlayani. Sebagaimana telah diketahui bahwa yang menjadi desa sasaran TMMD adalah desa yang tertinggal, terpencil, terisolasi, dan miskin, baik miskin secara ekonomi, miskin pengetahuan, maupun miskin keterampilan.

Melalui pendidikan anak usiadini dan pendidikan masyarakat dimungkinkan untuk memperoleh antara lain bentuk pendidikan keterampilan fungsional yang mengarah kepada keterampilan bermatapencaharian yang mampu memanfaatkan potensi alam daerah sekitarnya, sesuai kebutuhan belajar, dan mudah dilaksanakan sehingga masyarakat merasakan manfaatnya. Mengingat hal tersebut maka pada tahun 2018 kegiatan ini tetap dilaksanakan dengan daerah sasaran yang berbeda. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.



Gambar 7

Foto Kegiatan Rakor TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

### 1.9 Pelayanan Humas dan Protokoler

Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Humas dan Protokoler sudah terealisasi sesuai target dengan rincian sebagai berikut :

#### a. **Penyusunan Naskah Warta PAUD dan Dikmas (Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Ditjen PAUD dan Dikmas)**

Ditjen PAUD dan Dikmas memahami pentingnya pemanfaatan media komunikasi ini terletak pada kenyataan bahwa komunikasi publik semakin penting untuk terus dilakukan dalam rangka menciptakan pemahaman yang memadai bahwa pendidikan PAUD dan Dikmas tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan pendidikan formal. Bahwa pemerintah dalam hal ini Ditjen PAUD dan Dikmas memiliki kebijakan dan program yang sangat penting yang harus diketahui oleh masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Selain itu Ditjen PAUD dan Dikmas juga berkewajiban untuk menjaga citra institusi dan kebijakannya melalui perluasan akses informasi dan sosialisasi dan pengembangan komunikasi yang efektif.

Dengan latar belakang pemikiran seperti itu maka dipandang penting untuk mengadakan kegiatan Penyusunan Naskah Warta PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**b. Penyelenggaraan Konferensi Pers**

Media mempunyai peranan yang sangat besar di dalam mempublikasikan berbagai macam program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sehingga dengan adanya media, kita dapat mengetahui berbagai macam program pemerintah yang telah berhasil dan juga program-program yang perlu ditingkatkan serta diimplementasikan diberbagai daerah lainnya yang belum terjangkau.

Oleh Karena itu, kegiatan konferensi pers teramat penting bagi sebuah institusi seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Tujuan dari kegiatan konferensi pers ini yaitu tersampainya program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat luas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**c. Penyusunan Bahan Publikasi Bidang PAUD dan Dikmas**

Ditjen PAUD dan Dikmas berkewajiban untuk menjaga citra institusi dan kebijakannya melalui perluasan akses informasi dan sosialisasi dan pengembangan komunikasi yang efektif. Selain itu dalam rangka menciptakan pemahaman yang memadai bahwa pendidikan nonformal tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan pendidikan formal. Bahwa pemerintah dalam hal ini Ditjen PAUD dan Dikmas memiliki kebijakan dan program yang sangat penting yang harus diketahui oleh masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian dan partisipasi.

Oleh karena itu sangat mendesak dan penting melakukan upaya penyusunan bahan publikasi melalui dalam rangka strategi kehumasan yang efektif dan efisien. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**d. Pameran dan Promosi**

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) terus berusaha untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan peran kelembagaan dan satuan pendidikan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Salah satu usaha tersebut adalah melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pameran, baik disetiap moment hari nasional yang bertemakan pendidikan dan juga di momentum yang dianggap memiliki nilai strategis terhadap bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat bersama-sama komponen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk dengan beberapa organisasi mitra ataupun instansi pemerintahan lainnya.

Fasilitasi pelaksanaan pameran merupakan bentuk kegiatan yang sangat penting untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada masyarakat. Oleh karena itu, fasilitasi pelaksanaan pameran harus dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan objektif. Dengan prinsip-prinsip tersebut, fasilitasi pelaksanaan pameran dapat dilaksanakan secara tepat dan hasil-hasilnya dapat dirasakan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pada bidang pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**e. Pengelolaan Media Sosial PAUD dan Dikmas**

Dalam membangun citra yang positif dimata masyarakat luas, Ditjen PAUD dan Dikmas tentunya harus menginformasikan berbagai program dan kebijakan secara rutin atau berkala. Oleh sebab itu, humas atau sub bagian kerja sama mempunyai peranan yang penting dan strategis. Hal tersebut tentu guna membina hubungan yang harmonis antara pemerintah dalam hal ini Ditjen PAUD dan Dikmas dengan organisasi dan masyarakat.

Ditjen PAUD dan Dikmas dalam melakukan aktivitas komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui jalur media

informasi internal dan eksternal. Media informasi yang dimiliki oleh Ditjen PAUD dan Dikmas diantaranya yaitu website, majalah/ bulletin, dan media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan youtube. Sedangkan media informasi dari eksternal yang dimanfaatkan oleh Ditjen PAUD dan Dikmas yaitu media televisi, advertorial (koran (cetak dan elektronik), majalah), dan siaran radio.

Oleh karena itu, perlu adanya pengelola media sosial Ditjen PAUD dan Dikmas. Pengelola tersebut bertugas memposting berbagai informasi dan program Ditjen PAUD dan Dikmas di media sosial. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**f. Lomba Pangkalan SAKA WBB**

Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan kaum muda menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila dan berperan serta dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara, perlu membekali anggotanya dengan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional.

Dalam rangka meningkatkan percepatan pangkalan Saka Widya Budaya Bakti yang dibentuk di daerah, maka selaku pengurus SWBB Nasional diperlukan Lomba Pangkalan Saka Widya Budaya Bakti. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**g. Orientasi Satuan Pengamanan Di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas**

Kegiatan keamanan adalah merupakan bagian dari tugas dan fungsi Sub Bagian Rumah Tangga, Bagian Umum Dan Kerja Sama, Setditjen PAUD dan Dikmas sesuai dengan amanat dari pasal 264 ayat 2 permendikbud nomor 11 tahun 2015. Untuk itu, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas sudah merumuskan NSPK



terkait 5K yang didalamnya termasuk keterkaitan dengan keamanan dan ketertiban.

Isu-isu keamanan dalam negara tidaklah selalu bersifat militer semata. Persolan keamanan nasional maupun internasional juga kerap berkaitan dengan aspek-aspek non militer seperti kesenjangan ekonomi, masalah kesehatan, penyelundupan narkoba, dan lainnya. Tentunya, setiap negara harus dapat mendirikan suatu ketahanan yang kokoh agar dapat menciptakan situasi yang aman dan terbebas dari ancaman dan gangguan apapun. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**h. Orientasi Penguatan Keprotokolan di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas**

Keprotokolan dapat diartikan sebagai berbagai hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan/kantor maupun masyarakat. Awalnya, istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertiannya berkembang semakin luas, yakni keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup secara nasional maupun internasional.

Perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**i. Orientasi Petugas Kebersihan dan Tenaga Pengemudi pada Ditjen PAUD dan Dikmas**

Orientasi Petugas Kebersihan dan Tenaga Pengemudi merupakan bagian dari tugas dan fungsi Sub Bagian Rumah Tangga, Bagian Umum Dan Kerja Sama, Sesditjen PAUD dan Dikmas sesuai dengan amanat dari pasal 264 ayat 2 Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015. Untuk itu, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas sudah

merumuskan NSPK terkait 5K yang didalamnya termasuk kebersihan.

Ditjen PAUD dan Dikmas dalam melaksanakan kegiatan aktivitas perkatoran tidak terlepas dari petugas kebersihan dan tenaga pengemudi. Petugas kebersihan memiliki tugas untuk membersihkan ruang kerja, dan menjaga agar ruangan tetap nyaman digunakan oleh pegawai di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Sedangkan tenaga pengemudi yaitu bertugas untuk mengantar para pimpinan ataupun tamu yang berkaitan dengan pimpinan Ditjen PAUD dan Dikmas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi bagi petugas kebersihan dan tenaga pengemudi di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**j. Pengembangan Aplikasi Kerumahtanggaan**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**k. Penyusunan Kaleidoskop dan profil Ditjen PAUD dan Dikmas**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**l. Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan di Lingkungan Kerja**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

**m. Penyusunan Direktori SPK**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 1 (satu) layanan, tahun 2018 capaian kinerjanya sama sebanyak 1 (satu) layanan. Sedangkan dengan target akhir renstra tahun 2019 tidak bisa dibandingkan karena targetnya setiap tahun sama sebanyak 1 (satu) layanan dan bukan target kumulatif.

## 2. Layanan Internal (Overhead)

Ditargetkan sebanyak 1 layanan. Setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 1 layanan dengan persentase capaian 100%. Perealisasian indikator kinerja tersebut, didukung oleh kegiatan:

### 2.1. Pengadaan Kendaraan bermotor

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor sudah terealisasi sesuai target dengan persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini hingga 100%.

### 2.2. Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi sudah terealisasi sesuai target dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Peralatan dan Perlengkapan Data Center

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

### 2.3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran sudah terealisasi sesuai target dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Chiller AC

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

#### b. Pengelolaan Kerumahtanggaan Setditjen PAUD dan Dikmas

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

#### c. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 1 (satu) layanan, tahun 2018 capaian kinerjanya sama sebanyak 1 (satu) layanan. Sedangkan dengan target akhir renstra tahun 2019 tidak bisa dibandingkan karena targetnya setiap tahun sama sebanyak 1 (satu) layanan dan bukan target kumulatif.

### 3. Layanan Perkantoran

Ditargetkan sebanyak 1 layanan. Setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 1 layanan dengan persentase capaian 100%. Perealisasian indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan:

#### 3.1. Gaji dan Tunjangan

Pelaksanaan kegiatan Gaji dan Tunjangan sudah terealisasi sesuai target dengan rincian sebagai berikut :

##### a. Pembayaran Gaji dan tunjangan

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

#### 3.2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

##### a. Honorarium Tenaga Administrasi Lepas

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

##### b. Langganan Daya dan Jasa

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

##### c. Pemeliharaan Kantor

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

##### d. Penyelenggaraan Poliklinik

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

##### e. Pembayaran Terkait Dengan Operasional Satker

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

##### f. Konsumsi, Jamuan, dan Operasional Kantor

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

##### g. Pembayaran Operasional Pengelolaan Keuangan

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

##### h. Persediaan Keperluan Perkantoran

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana



hingga 100%.

**i. Penataan Gudang Ciganjur dan Sasana Krida Kemanggisan**

Persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sudah terlaksana hingga 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 1 (satu) layanan, tahun 2018 capaian kinerjanya sama sebanyak 1 (satu) layanan. Sedangkan dengan target akhir renstra tahun 2019 tidak bisa dibandingkan karena targetnya setiap tahun sama sebanyak 1 (satu) layanan dan bukan target kumulatif.

**B. Realisasi Anggaran**

Dari alokasi anggaran hasil revisi yang diperjanjikan kinerja sebesar Rp277.566.749.000,00 terealisasi sebesar Rp247.576.120.280,00 atau sebesar 89,20%. Jika dibandingkan dengan ketercapaian di tahun 2017, penyerapan anggaran di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,43%, yaitu dari 87,77% menjadi 89,20%.

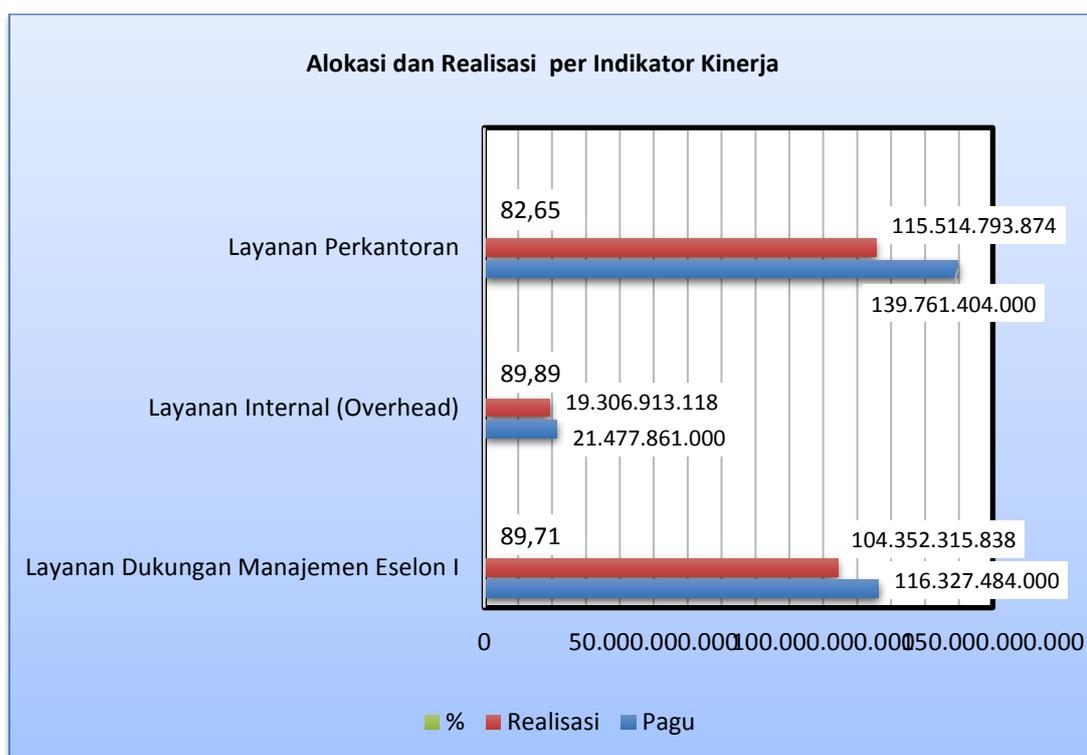
Ketercapaian realisasi anggaran tersebut didukung oleh 1 (satu) sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas dan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Layanan dukungan manajemen eselon I  
Dialokasikan anggaran sebesar Rp116.327.484.000,00, terealisasi sebesar Rp104.352.315.838,00 dengan persentase 89,71%.
2. Layanan internal (overhead)  
Dialokasikan anggaran sebesar Rp21.477.861.000 terealisasi sebesar Rp19.306.913.118,00 dengan persentase 89,89%.
3. Layanan perkantoran  
Dialokasikan anggaran sebesar Rp139.761.404.000 terealisasi sebesar Rp115.514.793.874,00 dengan persentase 82,65%.

Daya serap Setditjen PAUD dan Dikmas per indikator kinerja (output) yang telah mengalami revisi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1  
Realisasi anggaran per indikator kinerja

No	Indikator kinerja	Pagu Akhir	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Layanan Dukungan Manajemen Esselon I	116.327.484.000	104.352.315.838	89,71	11.975.168.162
2	Layanan Internal Overhead	21.477.861.000	19.306.913.118	89,89	2.170.947.882
3	Layanan Perkantoran	139.761.404.000	115.514.793.874	82,65	24.246.610.126
	<b>TOTAL</b>	<b>277.566.749.000</b>	<b>247.576.120.280</b>	<b>89,20</b>	<b>29.990.628.720</b>

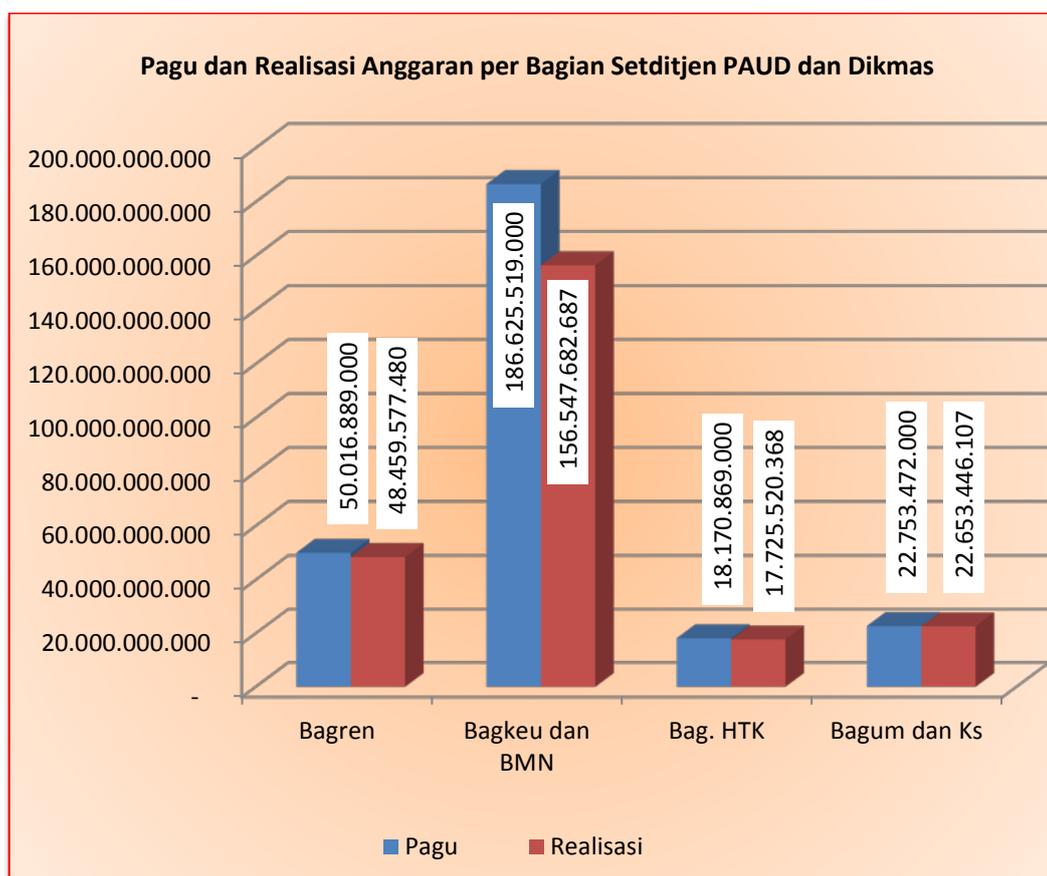


Gambar 8  
Realisasi anggaran per indikator kinerja Setditjen PAUD dan Dikmas

Tabel 2  
Realisasi anggaran per jenis belanja

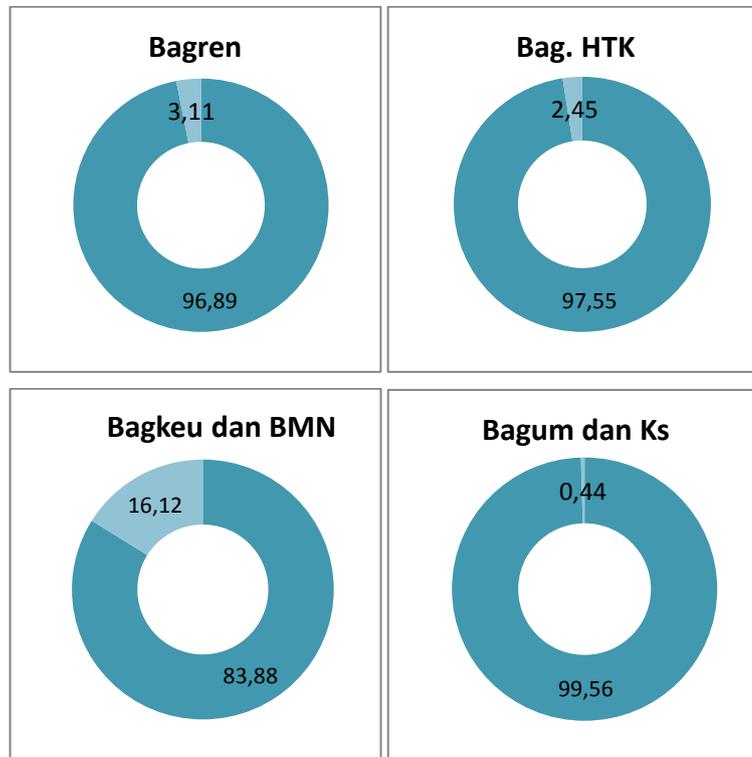
No	Jenis Belanja	Pagu Akhir	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	110.576.404.000	88.427.128.998	79,97	22.149.275.002
2	Belanja Barang	145.885.194.000	139.849.121.141	95,86	6.036.072.859
3	Belanja Modal	21.105.151.000	19.299.870.141	91,45	1.805.280.859
4	Belanja Sosial	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>277.566.749.000</b>	<b>247.576.120.280</b>	<b>89,20</b>	<b>29.990.628.720</b>

Realisasi Setditjen PAUD dan Dikmas per Bagian dapat dirinci sebagai berikut:



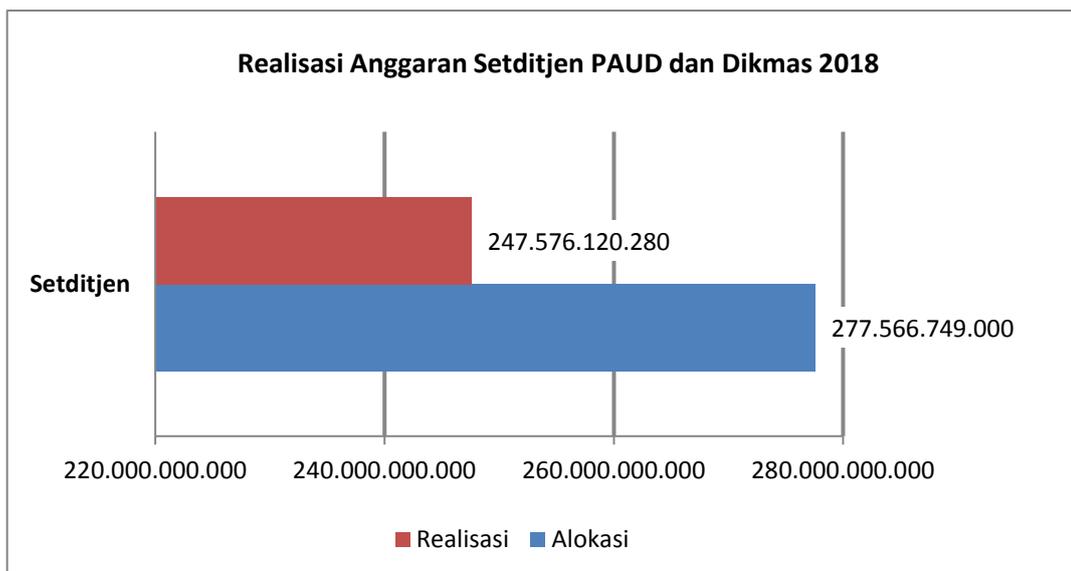
Gambar 9  
Pagu dan realisasi per Bagian Setditjen PAUD dan Dikmas

Dapat dilihat dari gambar di bawah ini persentase perbandingan pencapaian serapan anggaran Setditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018 :



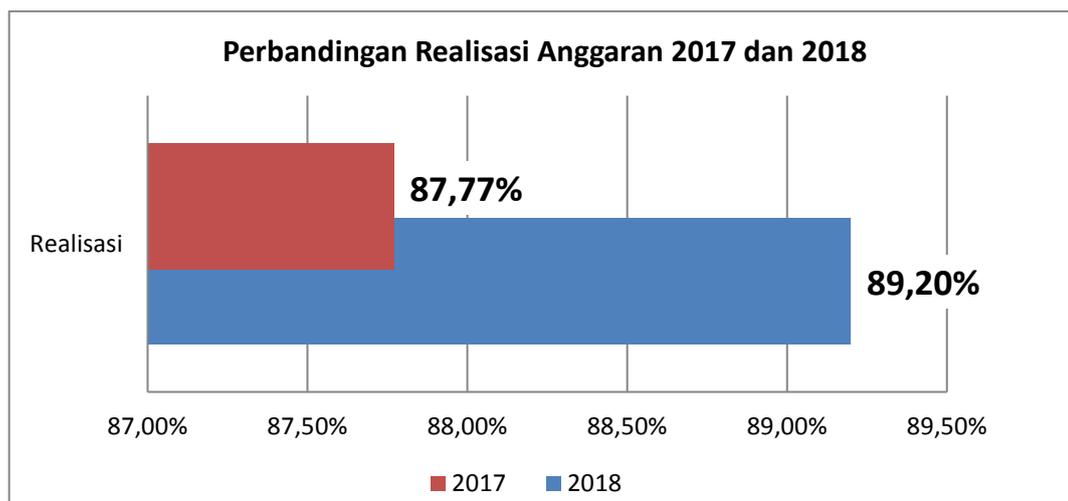
Gambar 10

Persentase Pagu dan realisasi per Bagian Setditjen PAUD dan Dikmas



Gambar 11

Realisasi anggaran Setditjen PAUD dan Dikmas



*Gambar 12*

*Perbandingan Realisasi Anggaran Setditen PAUD dan Dikmas Tahun 2017 dan 2018*

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya anggaran sesuai target, adalah sebagai berikut:

1. Perpres No 130 th 2018 terkait kenaikan Tunjangan Kinerja menjadi 80% baru terbit pada tanggal 28 Desember 2018. Sehingga anggaran Tunjangan Kinerja yang sudah disiapkan tidak ada waktu lagi untuk proses pencairan yang mengakibatkan daya serap anggarannya masih belum optimal.
2. Pada akhir tahun 2018 ada alokasi anggaran untuk tanggap bencana yang direvisi dan masuk ke sekretariat PAUD dan Dikmas sementara waktunya sudah mendesak di akhir tahun sehingga daya serapnya menjadi kurang maksimal.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

3. Melakukan langkah-langkah untuk mempercepat proses penyaluran dana bantuan dengan bekerja sama dengan UPT PAUD dan Dikmas.
4. Melakukan perhitungan tunjangan kinerja dengan langsung melibatkan satuan kerja yang ada di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada tahun 2018, secara umum kinerja Setditjen PAUD dan Dikmas tercapai sebesar 100% yang merupakan akumulasi perealisasi kinerja dari 3 indikator kinerja yang telah dihasilkan dari terselenggaranya Layanan Dukungan Teknis di lingkungan PAUD dan Dikmas sebagai berikut:

(1) indikator kinerja Layanan Dukungan Manajemen Eselon I perealisasiannya didukung oleh kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I meliputi: (a) penyusunan rencana program dan anggaran dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (b) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (c) pengelolaan data dan informasi dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (d) pengelolaan keuangan dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (e) pelayanan hukum dan kepatuhan internal dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (f) pengelolaan kepegawaian dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (g) pelayanan umum dan perlengkapan dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (h) pelayanan rumah tangga dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (i) pelayanan humas dan protokoler dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (j) pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (k) penyelenggaraan SEAMEO CECCEP dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%;

(2) indikator kinerja Layanan Internal perealisasiannya didukung oleh kegiatan layanan internal meliputi: (a) pengadaan kendaraan bermotor dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (b) pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (c) pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%;

(3) indikator kinerja Layanan Perkantoran perealisasiannya didukung oleh kegiatan layanan perkantoran meliputi (a) gaji dan tunjangan dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%; (b) operasional dan pemeliharaan kantor dengan target kinerja 1 layanan terealisasi sebesar 1 layanan atau 100%.



Secara keseluruhan merealisasikan anggaran Rp247.576.120.280,00 (89,20%); dari total Pagu anggaran sebesar Rp277.566.749.000,00

Permasalahan dalam pelaksanaan program Setditjen PAUD dan Dikmas yang perlu segera diantisipasi antara lain: (1) Perpres No 130 th 2018 terkait kenaikan Tunjangan Kinerja menjadi 80% baru terbit pada tanggal 28 Desember 2018. Sehingga anggaran Tunjangan Kinerja yang sudah disiapkan tidak ada waktu lagi untuk proses pencairan. Sehingga daya serap anggarannya masih belum optimal; (2) Pada akhir tahun 2018 ada alokasi anggaran untuk tanggap bencana yang direvisi dan masuk ke sekretariat PAUD dan Dikmas sementara waktunya sudah mendesak di akhir tahun sehingga daya serapnya menjadi kurang maksimal.

Ke depannya kebijakan yang akan dijalankan Setditjen PAUD dan Dikmas dititikberatkan pada: (1) Melakukan langkah-langkah untuk mempercepat proses penyaluran dana tanggap bencana dengan bekerja sama dengan UPT PAUD dan Dikmas. (2) Melakukan perhitungan tunjangan kinerja dengan langsung melibatkan satuan kerja yang ada di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas.

# LAMPIRAN



### Dokumen Pengukuran Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Realisasi			
		Target	Anggaran	Target	%	Anggaran	%
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	116.327.484.000	1 Layanan	100%	104.352.315.838	89,71
	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	21.477.861.000	1 Layanan	100%	19.627.014.473	89,89
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	139.761.404.000	1 Layanan	100%	115.514.793.874	82,65
<b>TOTAL</b>		1 Layanan	277.566.749.000	1 Layanan	100%	247.576.120.280	89,20



**Perjanjian Kinerja Tahun 2018**  
**Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

**TUGAS**

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

**FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, akan:

1. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. Mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. Mengelola data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. Mengkoordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. Mengkoordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
6. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
7. Melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
8. Mengelola kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
9. Mengkoordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
10. Mengelola barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
11. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.



**TARGET CAPAIAN**

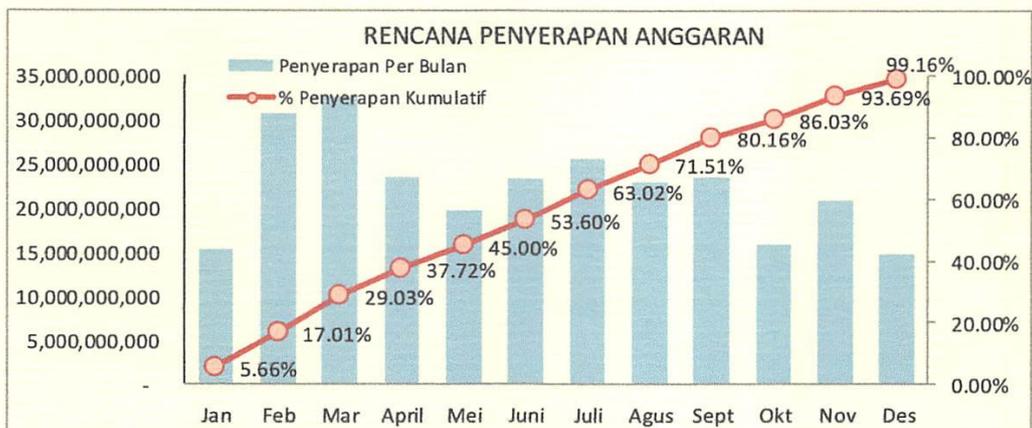
PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PAUD DAN DIKMAS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018	
		TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	109.649.672.000
	- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1 Layanan	12.304.209.000
	- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	8.031.580.000
	- Pengelolaan Data dan Informasi	1 Layanan	13.152.506.000
	- Pengelolaan Keuangan	1 Layanan	9.336.348.000
	- Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1 Layanan	5.671.300.000
	- Pengelolaan Kepegawaian	1 Layanan	13.698.700.000
	- Pelayanan Umum dan Perlengkapan	1 Layanan	4.248.183.000
	- Pelayanan Rumah Tangga	1 Layanan	19.635.347.000
	- Pelayanan Humas dan Protokoler	1 Layanan	10.342.380.000
	- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	1 Layanan	2.872.204.000
	- Penyelenggaraan SEAMEO CECCEP	1 Layanan	10.356.915.000

Jumlah Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD dan Dikmas sebesar **Rp 271.406.155.000,-** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*)

## Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas



NO	RENCANA PENYERAPAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Bulanan	15,367,030,957	30,812,689,573	32,600,594,517	23,583,760,851	19,769,431,462	23,334,716,755	25,567,268,755	23,036,928,462	23,479,968,962	15,929,260,906	20,799,232,240	14,844,327,061
2	Kumulatif	15,367,030,957	46,179,720,530	78,780,315,047	102,364,075,898	122,133,507,360	145,468,224,115	171,035,492,869	194,072,421,331	217,552,390,293	233,481,651,199	254,280,883,439	269,125,210,500
3	%	5.66%	17.01%	29.03%	37.72%	45.00%	53.60%	63.02%	71.51%	80.16%	86.03%	93.69%	99.16%

### EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal PAUD  
dan Pendidikan Masyarakat,

Harris Iskandar

Jakarta, Januari 2018  
Sekretaris Ditjen PAUD  
dan Pendidikan Masyarakat,

Wartanto



**Perjanjian Kinerja Tahun 2018**  
**Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

**TUGAS**

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

**FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, akan:

1. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. Mengelola data dan informasi bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. Mengkoordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
6. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
7. Melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
8. Mengelola kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
9. Mengkoordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
10. Mengelola barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
11. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

**TARGET CAPAIAN**

**PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

**KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS  
LAINNYA DITJEN PAUD DAN DIKMAS**

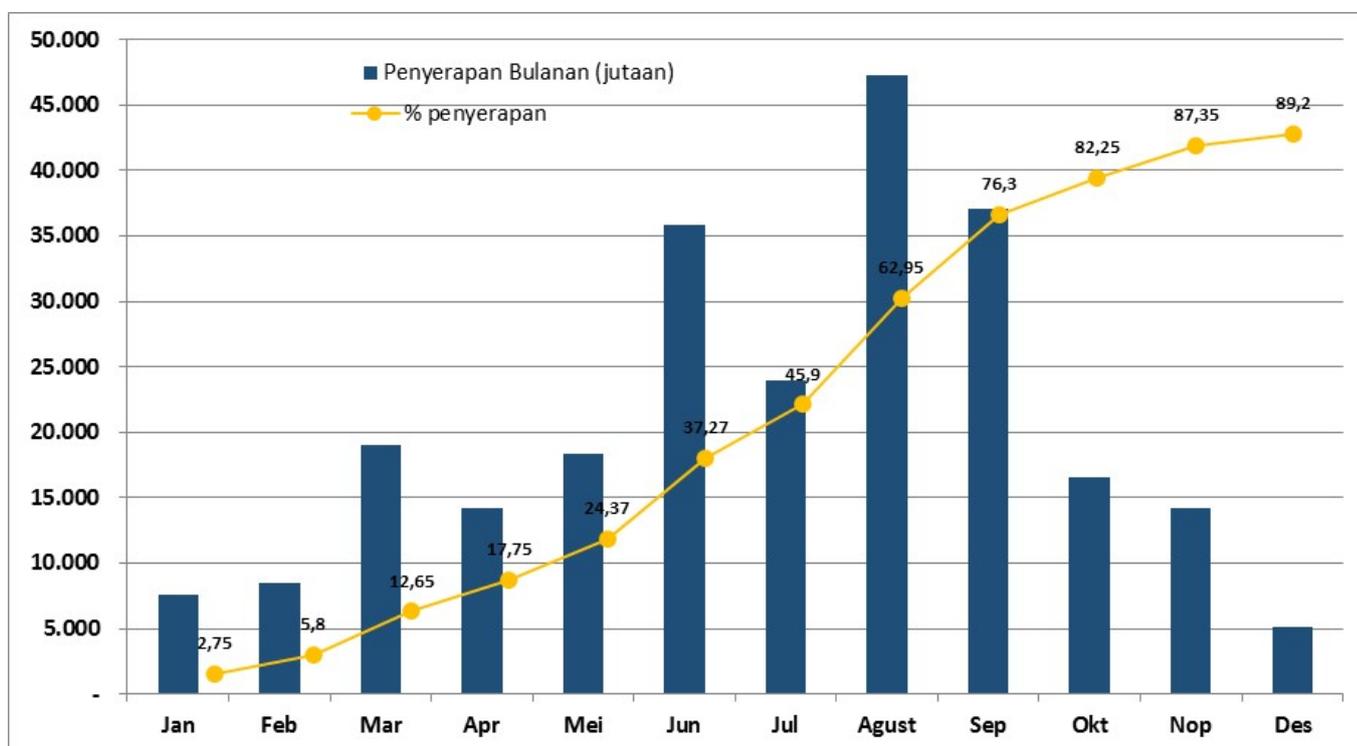
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018	
			TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	<b>1 LAYANAN</b>	<b>Rp116.327.484.000,00</b>	
	▪ Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1 Layanan	Rp10.231.742.000,00	
	▪ Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	Rp13.399.381.000,00	
	▪ Pengelolaan Data dan Informasi	1 Layanan	Rp8.676.723.000,00	
	▪ Pengelolaan Keuangan	1 Layanan	Rp8.588.750.000,00	
	▪ Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1 Layanan	Rp9.582.119.000,00	
	▪ Pengelolaan Kepegawaian	1 Layanan	Rp3.654.640.000,00	
	▪ Pelayanan Umum dan Perlengkapan	1 Layanan	Rp24.239.436.000,00	
	▪ Pelayanan Rumah Tangga	1 Layanan	Rp11.568.927.000,00	
	▪ Pelayanan Humas dan Protokoler	1 Layanan	Rp2.242.200.000,00	
	▪ Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	1 Layanan	Rp10.356.915.000,00	
	▪ Penyelenggaraan Seameo Ceccep	1 Layanan	Rp10.356.915.000,00	
		<b>Layanan Internal (Overhead)</b>	<b>1 LAYANAN</b>	<b>Rp21.477.861.000,00</b>
	▪ Pengadaan kendaraan bermotor	1 Layanan	Rp3.406.992.000,00	
	▪ Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	1 Layanan	Rp5.334.604.000,00	
	▪ Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Layanan	Rp12.736.265.000,00	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018	
		TARGET	ANGGARAN
	Layanan Perkantoran	<b>1 LAYANAN</b>	<b>Rp139.761.404.000,00</b>
	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	Rp110.576.404.000,00
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	Rp29.185.000.000,00

**Total Jumlah Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebesar Rp277.566.749.000,00**

## Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas



No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	Penyerapan Bulanan (jutaan)	7.633	8.466	19.013	14.156	18.375	35.806	23.954	47.325	37.055	16.515	14.156	5.135
2	Penyerapan	7.633	16.099	35.112	49.268	67.643	103.449	127.403	174.728	211.783	228.298	242.454	247.589
3	% penyerapan	2,75	5,8	12,65	17,75	24,37	37,27	45,9	62,95	76,3	82,25	87,35	89,2

### EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal PAUD  
dan Pendidikan Masyarakat



Harris Iskandar

Sekretaris Ditjen PAUD  
dan Pendidikan Masyarakat



Wartanto



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
TAHUN 2018**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
TAHUN 2018**